



LMCK TW IV BPTD KELAS II JABAR

Balai Pengelola Transportasi Darat

Kelas II Jawa Barat Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja TW IV
Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat
Tahun 2024

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Dani Muhamad Yanuar	Penyusun Rencana dan Pelaporan	20 /1/2025	
2	Dikonsep	Gilang Adi Subagja, S.A.P	Penyusun Rencana dan Pelaporan	20 /1/2025	
3	Diperiksa	Danny Irawan Siswoyo, S.SiT	Kepala Subbagian Tata Usaha	21 /1/2025	
8	Disetujui	Hanuara Kelana I, A.Md.LLAJ., S.Sos., S.H., M.M.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa barat	23 /1/2025	



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAWA BARAT



LMCK

LAPORAN MINITORING
CAPAIAN KINEJA **2024**

TRIWULAN IV

BPTD KELAS II JAWA BARAT



Bptd_jabar



Bptdjabar



Bptdjabar



Bptdjabar@Gmail.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulanan merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2024 setiap triwulanan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Draft* Rencana Strategis BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 12 (dua belas) dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024, BPTD Kelas II Jawa Barat telah melaksanakan dengan sangat baik. Dengan hasil 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian di Triwulan IV ini lebih besar atau sama dengan 60% ($\geq 60\%$).

Hasil rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan pada Triwulan IV ini sebesar 99,56% atau 99,57% dari target keseluruhan sasaran kegiatan Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan sangat baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi BPTD Kelas II Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana yang telah dirumuskan dalam *Draft* Rencana Strategis BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2020-2024.

KATA PENGANTAR



Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Barat yang terbentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016, dimana pada saat ini telah mengalami perubahan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Sebagai instansi pemerintah yang mandiri, BPTD Kelas II Jawa Barat juga perlu untuk menyusun sebuah Laporan Monitoring Capaian Kinerja sebagai acuan dan tolak ukur pengukuran kinerja setiap triwulanan. Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2024 sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan selama triwulan berjalan sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2024.

Tujuan penyajian Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam periode Triwulan IV, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPTD Kelas II Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini juga dapat memberikan penjelasan pertanggung jawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Bandung, 23 Januari 2025

**Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat**

Hanura Kelana I, A.Md.LLAJ., S.Sos., S.H., M.M.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19670516 198903 1 012

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR.....	i
	RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
	DAFTAR ISI.....	iii
	DAFTAR TABEL.....	X
	DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	I.1 Latar Belakang.....	1
	I.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
	I.2.1 Bagan Struktur Organisasi.....	3
	I.3 Sumber Daya Manusia.....	5
	I.4 Potensi, Isu, Strategis dan Permasalahan.....	6
	I.5 Sistematika Laporan.....	8
	I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	14
	I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.....	15
	I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB II	AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
	II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	19
	II.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	20
	II.3 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Atarmoda Transportasi.....	26
	IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.....	26
	- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	26
	- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	27
	- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	28
	- Dasar Hukum.....	28
	- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	28
	- Faktor Keberhasilan.....	29
	- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	29
	- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	29
	- Perhitungan Capaian Kinerja.....	30
	- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	30
	- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	30
	IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi.....	31
	- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	31
	- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	31
	- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	32
	- Dasar Hukum.....	32
	- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	32
	- Faktor Keberhasilan.....	32

- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	32
- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	33
- Perhitungan Capaian Kinerja.....	33
- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	33
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	34
IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kepirintisan Angkutan	34
Penyeberangan.....	
- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	34
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	34
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	35
- Dasar Hukum.....	35
- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	35
- Faktor Keberhasilan.....	36
- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	36
- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	36
- Perhitungan Capaian Kinerja.....	36
- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	36
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	36
IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi.....	37
- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	37
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	37
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	38
- Dasar Hukum.....	38
- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	38
- Faktor Keberhasilan.....	38
- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	38
- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	39
- Perhitungan Capaian Kinerja.....	39
- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	39
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	40
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat.....	40
IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A.....	40
- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	40
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	41
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	42
- Dasar Hukum.....	42
- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	42
- Faktor Keberhasilan.....	42

	- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	42
	- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	43
	- Perhitungan Capaian Kinerja.....	43
	- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	43
	- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	44
IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A.....	44
	- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	44
	- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	45
	- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	45
	- Dasar Hukum.....	45
	- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	45
	- Faktor Keberhasilan.....	46
	- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	46
	- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	46
	- Perhitungan Capaian Kinerja.....	46
	- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	47
	- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	47
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP.....	48
	- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	48
	- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	48
	- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	49
	- Dasar Hukum.....	49
	- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	50
	- Faktor Keberhasilan.....	50
	- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	50
	- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	51
	- Perhitungan Capaian Kinerja.....	51
	- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	51
	- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	52
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat.....	52
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.....	53
	- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	53
	- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	53
	- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	54
	- Dasar Hukum.....	54
	- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	54
	- Faktor Keberhasilan.....	55

	- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	55
	- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	55
	- Perhitungan Capaian Kinerja.....	56
	- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	56
	- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	56
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.....	57
	- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	57
	- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	57
	- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	58
	- Dasar Hukum.....	58
	- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	59
	- Faktor Keberhasilan.....	59
	- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	59
	- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	60
	- Perhitungan Capaian Kinerja.....	60
	- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	60
	- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	61
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.....	61
	- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	61
	- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	62
	- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	63
	- Dasar Hukum.....	63
	- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	63
	- Faktor Keberhasilan.....	63
	- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	63
	- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	63
	- Perhitungan Capaian Kinerja.....	63
	- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	63
	- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	64
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	64
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	64
	- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	64
	- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	64
	- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	65
	- Dasar Hukum.....	65
	- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	65
	- Faktor Keberhasilan.....	66

	- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	66
	- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	66
	- Perhitungan Capaian Kinerja.....	67
	- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	67
	- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	67
	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel.....	68
IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	68
	- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan.....	68
	- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	68
	- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	69
	- Dasar Hukum.....	69
	- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja.....	69
	- Faktor Keberhasilan.....	69
	- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan.....	69
	- Perhitungan Realisasi Kinerja.....	71
	- Perhitungan Capaian Kinerja.....	72
	- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan.....	72
	- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang...	72
II.4	Realisasi Anggaran.....	73
II.5	Alokasi Anggaran Tahun 2024.....	73
II.5.1	Pagu Anggaran.....	73
	- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024.....	73
	- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	73
	- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran.....	73
II.5.2	Anggaran Tahun 2024.....	75
	- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024.....	74
	- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	75
	- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	76
II.5.3	Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2024.....	76
II.6	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	77
II.6.1	Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024...	77
II.6.2	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	77
II.6.3	Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024.....	78
II.7	Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja.....	78
II.7.1	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	78
II.7.2	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan.....	79
II.7.3	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia.....	79
II.8	Hambatan dan Kendala.....	80
BAB III	PENUTUP.....	81

III.1	Penutup.....	81
III.2	Ringkasan Capaian.....	81
III.3	Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab.....	82

LAMPIRAN

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024;

Perjanjian Kinerja Tahun 2024;

Rencana Aksi Tahun 2024;

Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Justifikasi Pengoperasian Wilayah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Provinsi Jawa Barat

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Komposisi Pegawai BPTD Jabar Tahun 2024.....	5
Tabel II.1	Rata-Rata Capaian Dari Seluruh Sasaran Kegiatan.....	25
Tabel II.2	Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.....	28
Tabel II.4	Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi.....	31
Tabel II.6	Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.....	35
Tabel II.7	Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.....	37
Tabel II.8	Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.....	41
Tabel II.9	Capaian IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A.....	45
Tabel II.10	Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.....	49
Tabel II.11	Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.....	54
Tabel II.12	Capaian IKK Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.....	58
Tabel II.15	Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Jalan.....	62
Tabel II.19	Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	65
Tabel II.20	Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.I	Struktur Organisasi BPTD Kelas II dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.....	3
------------	---	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani)
- Lampiran II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani);
- Lampiran III Rencana Aksi Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani);
- Lampiran IV Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024
- Lampiran V Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024
- Lampiran VI Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Lampiran VII Justifikasi Pengoperasian Wilayah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Provinsi Jawa Barat

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

BPTD Kelas II Jawa Barat sebagai instansi pemerintah yang mandiri juga perlu untuk menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja sebagai acuan dan tolok ukur pengukuran kinerja setiap triwulannya. Penyusunan LMCK oleh BPTD Kelas II Jawa Barat sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan LMCK Triwulan IV BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2024 sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya sebagai alat untuk melakukan pengukuran keberhasilan tingkat kinerja yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam periode triwulanan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPTD Kelas II Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal Barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
 - c. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Gambar I.1 Struktur Organisasi BPTD Kelas II dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelayanan, dan kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan kearsipan, dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian Terminal Tipe A, Terminal Barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan

dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

5. Satuan Pelayanan

Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian dan/atau seluruh tugas pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal Barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengendalian dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat per tanggal 31 Desember 2024 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 299 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) orang dan Pegawai Pemerintah (PPPK) Sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) Orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 437 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh) orang. Alokasi jumlah pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), untuk masing-masing satuan pelayanan dan kantor induk sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI			
		PNS	P3K	PPNPN	JUMLAH
A	Kantor Induk	51	8	35	94
B	Satpel Terminal				
	1. TTA Harjamukti – Cirebon	18	3	19	40
	2. TTA Indihiang – Tasikmalaya	22	3	21	46
	3. TTA KH. Ahmad Sanusi - Sukabumi	15	1	37	53
	4. TTA Ciakar – Sumedang	10		24	34
	5. TTA Guntur Melati – Garut	23	2	37	62
	6. TTA Banjar	19	1	30	50
	7. TTA Cikampek	4	4	9	17
	8. TTA Subang	7	1	24	32
	9. TTA Kertawangunan – Kuningan	11	1	17	39
	10.TTA Leuwipanjang – Bandung	23	6	46	75

C	Satpel UPPKB				0
	1. UPPKB Balonggandu – Karawang	16	3	20	39
	2. UPPKB Losarang – Indramayu	12	4	24	40
	3. UPPKB Kemang - Bogor	17	7	10	34
	4. UPPKB Tomo – Sumedang	14	3	15	32
	5. UPPKB Gentong – Tasikmalaya	16	3	18	37
	6. UPPKB Cibaragalan - Purwakarta	8	1	12	21
	7. UPPKB Bojong - Cianjur (belum beroperasi)				
D	Wilayah Kerja TSDP				
	1. Satuan Pelayanan Cirata	5		9	14
	2. Satuan Pelayanan Saguling	3		4	10
	3. Satuan Pelayanan Jatiluhur	1		9	7
	4. Satuan Pelayanan Panjalu	1		11	12
	5. Satuan Pelayanan Pangandaran	3		6	9
TOTAL		299	51	437	787

Tabel I.1 Komposisi Pegawai BPTD JABAR Tahun 2024

Sumber : Pengelola Kepegawaian (Posisi 31 Desember 2024)

I.4 POTENSI, ISU, STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

I.4.1 Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2 Sumber Daya Manusia

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2023, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terutama dalam rangka penunjang pelaksanaan tupoksi sejalan dengan program kinerja yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

I.4.3 Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4 Isu Strategis

Isu Strategis BPTD Kelas II Jawa Barat adalah:

1. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
2. Pengoperasian Terminal Penumpang;
3. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
4. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
5. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
6. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
7. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
8. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
9. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal Tipe A dan UPPKB serta Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.
10. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

I.4.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2024 adalah:

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Indikator Kinerja Kegiatan;

4. Pengukuran Kinerja;
5. Evaluasi Kinerja.

I.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu, Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
- II.3 **SK1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI**

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum
 - Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
 - Faktor Keberhasilan
 - Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Perhitungan Capaian Kinerja
 - Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum
 - Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
 - Faktor Keberhasilan
 - Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Perhitungan Capaian Kinerja
 - Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum
 - Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
 - Faktor Keberhasilan
 - Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Perhitungan Capaian Kinerja
 - Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum
 - Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
 - Faktor Keberhasilan
 - Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Perhitungan Capaian Kinerja

- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

SK2 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum
 - Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
 - Faktor Keberhasilan
 - Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Perhitungan Capaian Kinerja
 - Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum
 - Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
 - Faktor Keberhasilan
 - Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Perhitungan Capaian Kinerja
 - Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum

- Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
- Faktor Keberhasilan
- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
- Perhitungan Realisasi Kinerja
- Perhitungan Capaian Kinerja
- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

SK4 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

IKK 3.1 Persentase Pelaksanaan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum
 - Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
 - Faktor Keberhasilan
 - Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Perhitungan Capaian Kinerja
 - Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum
 - Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
 - Faktor Keberhasilan
 - Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Perhitungan Capaian Kinerja
 - Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum
 - Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
 - Faktor Keberhasilan
 - Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Perhitungan Capaian Kinerja
 - Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

SK5 MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT**IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat**

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum
 - Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
 - Faktor Keberhasilan
 - Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Perhitungan Capaian Kinerja
 - Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

SK6 MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT**IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat**

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Dasar Hukum
 - Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja
 - Faktor Keberhasilan

- Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan
 - Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Perhitungan Capaian Kinerja
 - Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
 - Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- II.4 Realisasi Anggaran
- II.3 Alokasi Anggaran Tahun 2024
- II.5.1 Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
 - Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- II.5.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2024
- II.6 Realisasi Anggaran Tahun 2024
- II.6.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- II.6.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- II.6.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- II.7 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
- II.7.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- II.7.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan
- II.7.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia
- II.8 Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

- III.1 Penutup
- III.2 Ringkasan Capaian
- III.3 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani);
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani);
3. Rencana Aksi Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani);
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
7. Justifikasi Pengoperasian Wilayah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Provinsi Jawa Barat.

I.6 URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat Tahun 2024 sesuai *draft* Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat 2020-2024.

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPTD Tahun 2020-2024, dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan dan tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dalam perkembangannya Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 BPTD Kelas II Jawa Barat mengalami penambahan terutama dalam hal penambahan sasaran kegiatan yang tercantum berdasarkan hasil perumusan revisi manual Indikator Kinerja Utama BPTD dan penyusunan *draft* rencana strategis Tahun 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

I.7 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Dalam perkembangannya, Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya seiring adanya revisi manual Indikator Kinerja Utama yang berlaku di lingkungan BPTD dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Infrastruktur Konektifitas	Rp. 179.049.642.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 28.703.927.000
3.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 76.117.906.000
4.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 63.198.191.000
5.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 11.029.618.000
6.	Pogram Dukungan Manajemen	Rp. 50.114.111.000
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.987.638.000
8.	Pengelolaan Perencanaan,Keuangan,BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 43.126.473.000
	TOTAL	Rp. 229.163.753.000

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan secara mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada umumnya serta Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat pada khususnya, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

- **Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan target dan realisasi kinerja terhadap perjanjian kinerja 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan periode Triwulan IV Tahun 2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Kelas II Jawa Barat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dari total 12 (dua belas) indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BPTD, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target perjanjian kinerja dengan capaian BPTD Kelas II Jawa Barat maka diperoleh data Capaian Kinerja Triwulan IV adalah sebesar 100%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Tabel II.1 Rata-Rata Capaian Dari Seluruh Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024	TW I			TW II			TW III			TW IV			CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II	CAPAIAN TW III	CAPAIAN TW IV
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C				
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar Moda Transportasi					100%			100%			100%			100%	64%	83%	92%	100%
IKK.1.1	Persentase Keberintisan Angkutan Jalan	%	90	25	25	100%	60	60	100%	75	75	100%	90	90	100%	28%	67%	83%	100%
IKK.1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi	Lokasi	10	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
IKK.1.5	Persentase Pelaksanaan Layanan Keberintisan Angkutan Penyebrangan	%	90	25	25	100%	60	60	100%	75	75	100%	90	90	100%	28%	67%	83%	100%
IKK.1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	15	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	100%	100%	100%	100%
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat					100%			100%			100%			100%	25%	75%	85%	100%
IKK.2.1	Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	100	25	25	100%	75	75	100%	85	85	100%	100	100	100%	25%	75%	85%	100%
IKK.2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	100	25	25	100%	75	75	100%	85	85	100%	100	100	100%	25%	75%	85%	100%
IKK.2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan	%	100	25	25	100%	75	75	100%	85	85	100%	100	100	100%	25%	75%	85%	100%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					67%			67%			100%			100%	17%	37%	79%	100%
IKK.3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	20	20	100%	60	60	100%	70	70	100%	90	90	100%	22%	67%	78%	100%
IKK.3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	10	10	100%	15	15	100%	21	21	100%	35	35	100%	29%	43%	60%	100%
IKK.3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Darat	Orang	100	0	0	0%	0	0	0%	100	100	100%	100	100	100%	0%	0%	100%	100%
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100%			100%			100%			100%	94%	94%	94%	100%
IKK.5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	85	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	85	85	100%	94%	94%	94%	100%
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					100%			100%			100%			100%	94%	94%	94%	100%
IKK.6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan darat	Nilai	85	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%	85	85	100%	94%	94%	94%	100%
Rata-rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						100%			93%			100%			100%	59%	77%	89%	100%
Rata-rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						157%			150%			100%			100%	108,12%	129,66%	150,00%	100,00%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 100% (IKP > 100%)						11			11			12			12	2	2	1	0
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan Kurang dari 100% (0 < IKP < 100%)						1			1			0			0	10	10	11	12

II.3 SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan salah satu direktorat di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Barat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya wilayah Provinsi Jawa Barat. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat sesuai tugas dan wewenanginya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Kelas II Jawa Barat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 1.1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan;
2. IKK 1.3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi;
3. IKK 1.5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan;
4. IKK 1.6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

- Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan subsidi angkutan jalan perintis berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019. Ada dua kriteria untuk menetapkan angkutan jalan perintis, yaitu faktor finansial dan faktor keterhubungan.

Kriteria faktor finansial berupa tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesibilitas angkutan antar daerah masih rendah, trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah.

Sedangkan kriteria faktor keterhubungan dapat berupa menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum, menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia, melayani daerah yang terkena dampak bencana alam, dan melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis atau Angkutan udara perintis. Dalam hal pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk angkutan orang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki trayek tetap dan teratur;
- b. Sifat pelayanan tidak boleh terhenti;
- c. Tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh angkutan umum lainnya;
- d. Lokasi keberangkatan dan kedatangan berupa terminal, halte, atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- e. Mencantumkan informasi Trayek dan tarif pada terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- f. Memberikan pelayanan angkutan paling sedikit 1 keberangkatan dalam setiap hari; dan
- g. Menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% dari Jumlah kendaraan yang dioperasikan.

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

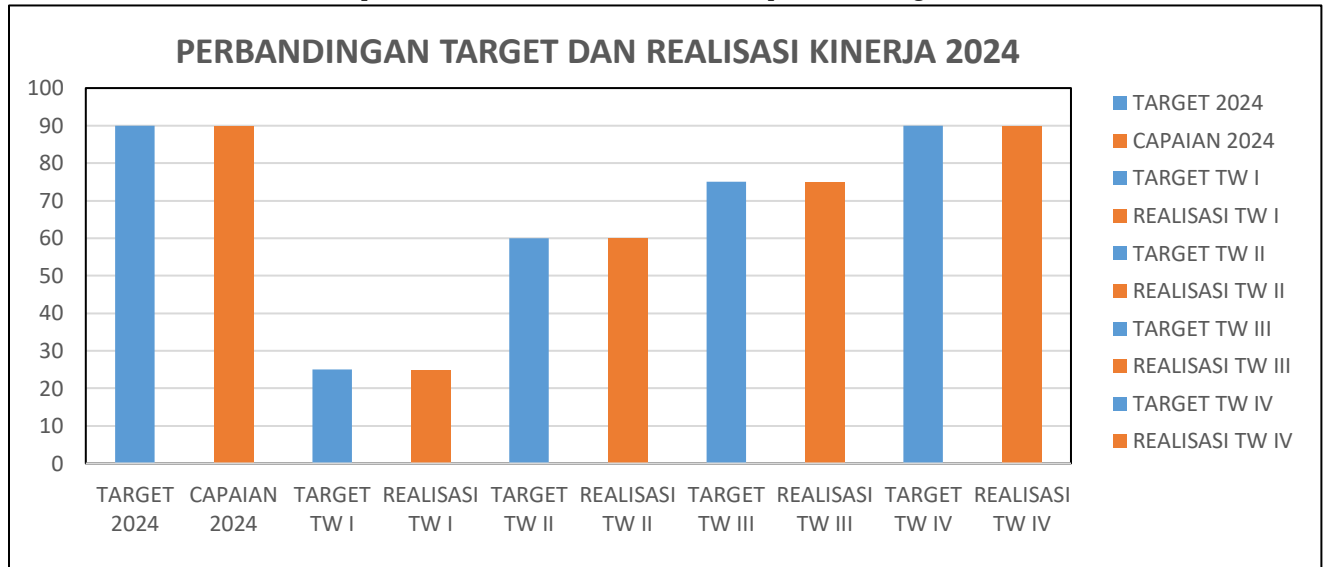
$$= \frac{\text{Jumlah RIT Realisasi pada Tahun 2024}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 90%. Pencapaian ini digambarkan pada Tabel II.2. Tabel Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.

Tabel II.2 Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
90	100	25	25	60	60	75	75	90	100

- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8613 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024.

• Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Telah dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan studi/kajian setiap tahunnya dan ditindaklanjuti dengan proses penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
2. Pemberian Subsidi angkutan keperintisan di wilayah Bandung dan Bogor berdampak pada terlayannya aksesibilitas transportasi darat yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang dilalui trayek angkutan perintis;
3. Hingga saat ini, angkutan perintis selalu memiliki penumpang walapun kondisinya tidak menguntungkan seperti halnya angkutan komersil.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

1. Tidak ada perbaikan prasarana pada trayek angkutan perintis yaitu jalan yang melewati dan membatasi beban jalan sehingga umur jalan sesuai dengan rancangan awal;
2. Tidak terdapatnya armada yang dapat menyesuaikan kondisi trayek yang dilalui yaitu dengan spesifikasi tertentu misalnya jarak yang tinggi antara roda dan *body*, armada yang nyaman untuk penumpang tapi dapat menampung barang-barang, serta *sparepart* yang mudah untuk didapatkan;
3. Tidak terdapat peran agresif dari pemerintah pusat dalam memberikan bantuan yang mendukung penyelenggaraan dan pengembangan angkutan perintis.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Dari layanan pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di wilayah Bandung dan Bogor Triwulan IV Tahun 2024 diketahui bahwa :

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{Jumlah RIT Realisasi s/d TW IV} & \\
 & 3.752 \text{ RIT} & \times 100\% \\
 = & \frac{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}}{7.404 \text{ RIT}} &
 \end{array}$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(90\%-(75\%-75\%)}{100\%} \times 100\%$$

- **Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi Triwulan IV sebanyak Rp. 9.733.264.927,- dari total pagu sebesar Rp. 9.733.268.000,- atau sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Subsidi Angkutan Keperintisan Bandung dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 6.264.279.000,- dan realisasi Triwulan IV s/d mencapai Rp. 6.264.278.115,- atau 100%
2. Subsidi Angkutan Keperintisan Bogor dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.468.989.000,- dan realisasi Triwulan IV s/d mencapai Rp. 3.468.986.812,- atau ,100 %.

- **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang**

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan IV Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan melalui:

1. Pemberian subsidi bagi angkutan perintis yang melayani masyarakat di daerah pedalaman yang belum terjangkau sarana transportasi umum secara optimal (pengusulan rute baru);
2. Terus berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang dilalui oleh rute angkutan keperintisan;
3. Melaksanakan monitoring efektifitas pelaksanaan angkutan jalan perintis secara mandiri.

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi

- Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan, Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di jalan.

Terminal tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

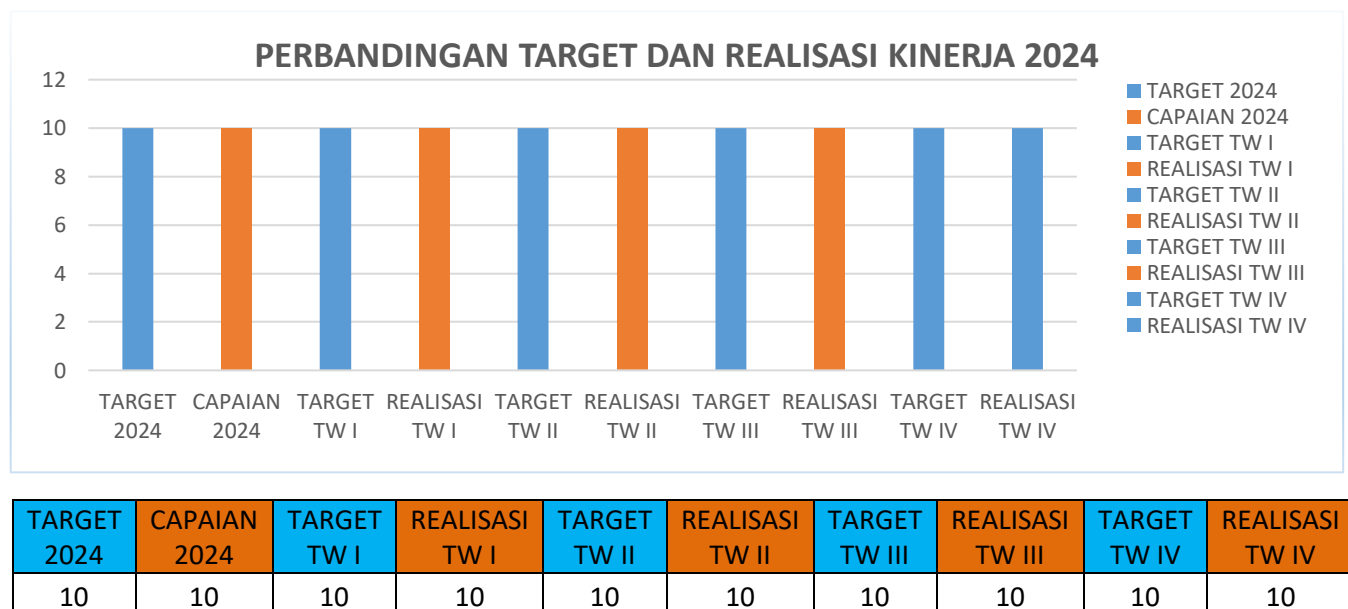
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi}$$

- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Triwulan IV Tahun 2024 sebanyak 10 Lokasi dengan presentase sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebanyak 10 Lokasi dengan presentase sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Tabel II.4. Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi.

Tabel II.4 Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi



- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Jawa Barat memiliki 10 Terminal Tipe A yang beroperasi.

• Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

Target pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi berdasarkan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2024 di wilayah BPTD Kelas II Jawa Barat.

• Faktor Keberhasilan

1. 10 (Sepuluh) Terminal Penumpang Tipe-A yang berada di wilayah Jawa Barat sudah selesai serah terima operasional yang menjadi kewenangan BPTD Kelas II Jawa Barat;
2. Akses jalan yang memadai dan dapat dilalui oleh angkutan antarmoda di 10 (sepuluh) Terminal Penumpang Tipe-A yang berada di wilayah Jawa Barat;
3. Kondisi sarana yang memadai di 10 (sepuluh) terminal Penumpang Tipe-A yang berada di wilayah Jawa Barat.

• Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

1. Adanya kerusakan berat yang diakibatkan oleh bencana alam (gempa bumi) di Terminal Penumpang Tipe-A sehingga Terminal Penumpang Tipe-A tidak dapat beroperasi;
2. Terminal Penumpang Tipe-A masih dalam proses Revitalisasi;

3. Proses aset P3D Terminal Perumpang Tipe-A dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat belum selesai.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Dari layanan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Triwulan IV Tahun 2024 diketahui bahwa :

= 10 terminal Tipe A Yang Beroperasi

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(100\% - (10\% - 10\%))}{100\%} \times 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi Triwulan IV sebanyak Rp. 29.088.307.818,- dari total pagu sebesar Rp. 29.458.610.000,- atau sebesar 98,74 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Terminal Banjar dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.786.666.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.786.591.397,- atau 100%;
2. Operasional Terminal Indihiang (Tasikmalaya) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.922.360.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.922.302.681,- atau 100%;
3. Operasional Terminal Guntur Melati (Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.703.171.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.703.072.095,- atau 100%;
4. Operasional Terminal Subang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.791.467.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.791.401.006,- atau 100%;
5. Operasional Terminal Sudirman (Sukabumi) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.576.973.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.573.868.820,- atau 100%;

6. Operasional Terminal Ciakar (Sumedang) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.831.619.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.831.480.144,- atau 99,99%;
7. Operasional Terminal Kertawangunan (Kuningan) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.595.652.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.595.574.273,- atau 100%;
8. Operasional Terminal Harjamukti (Cirebon) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.290.559.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.290.375.719,- atau 99,99%;
9. Operasional Terminal Cikampek dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.405.710.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.405.623.265,- atau 99,99%;
10. Operasional Terminal Leuwipanjang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 6.054.433.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 5.868.350.549,- atau 93,92%.

- **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang**

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Triwulan IV Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan operasional Terminal Tipe A melalui beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana dan prasarannya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Terminal baik berupa *ticketing online*, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan Bus dari Terminal secara *online*;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk naik Bus di Terminal.

IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

- **Definisi Indikator Kinerja**

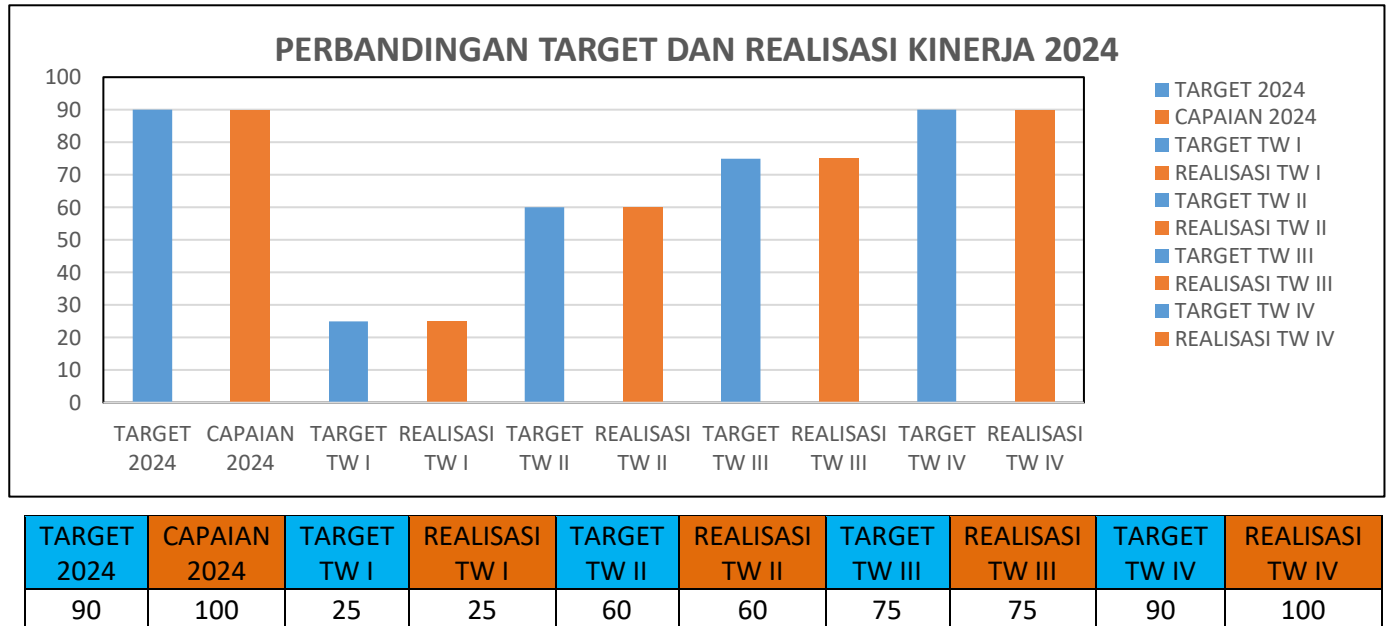
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Pada Tahun 2024 tidak terdapat target kinerja atas indikator kinerja Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan maka capaian kinerja mencapai 90%.

Pencapaian ini digambarkan pada Tabel II.6. Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.

Tabel II.6 Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan



- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan bahwa lintas yang memenuhi kriteria *load factor* lebih besar 60% dan sudah menguntungkan secara finansial, maka masuk kedalam kategori pelayanan komersil.

• Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut

- **Faktor Keberhasilan**

Tidak terdapat target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sehingga tidak dapat menentukan faktor keberhasilan atas indikator tersebut.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Tidak terdapat target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sehingga tidak dapat menentukan faktor kegagalan atau potensi kegagalan atas indikator tersebut.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 90% sehingga realisasi kinerja 100% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada Tahun 2024 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 90% walaupun tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan.

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan SDP Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi Triwulan IV sebanyak Rp. 16.123.727.808,- dari total pagu sebesar Rp. 16.123.728.000,- atau sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Subsidi Angkutan Keperintisan di Ro ro Long Distance Ferry Patimban – Banjarmasin dan Patimban -Pontianak dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 16.123.728.000,- dan realisasi Triwulan IV s/d mencapai Rp. 16.123.727.808,- atau 100%

- **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang**

Pada Tahun 2024 ini tidak terdapat target kinerja yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus berupaya untuk membantu mewujudkan program-program kinerja dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila di tahun-tahun mendatang terdapat program kinerja yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

- Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

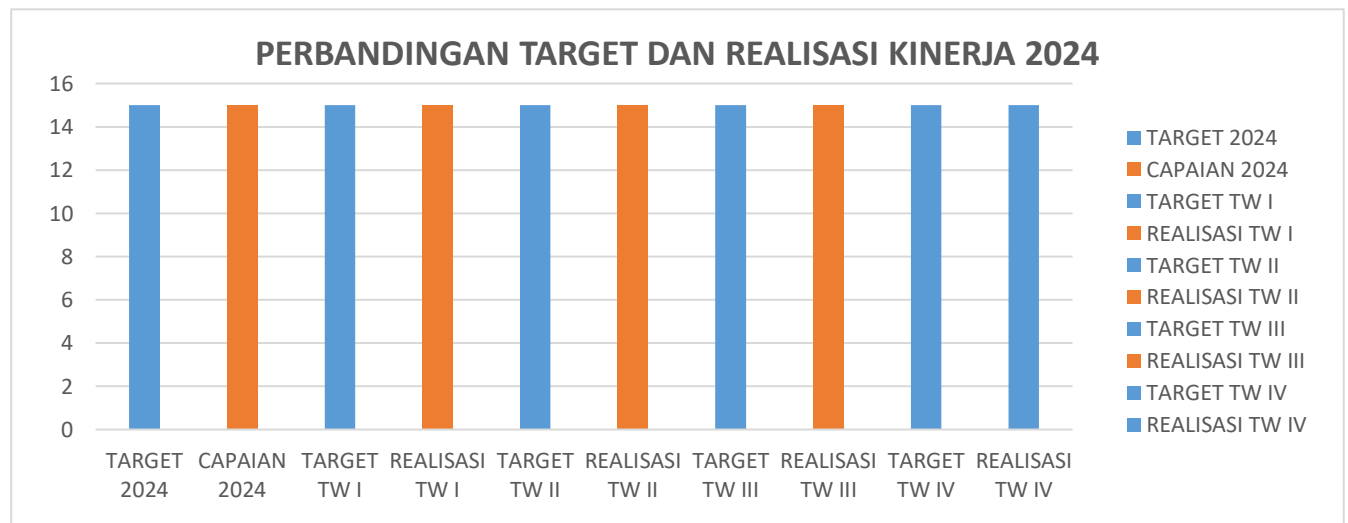
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dengan satuan ukur jumlah lokasi digunakan rumus sebagai berikut :

= Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)

- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada Triwulan IV Tahun 2024 terdapat target kinerja atas indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebanyak 15 Lokasi dengan capaian sebanyak 15 Lokasi wilayah kerja, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Tabel II.7. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi.

Tabel II.7 Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.DRJD 3339 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pedoman Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Justifikasi Kepala BPTD Wilayah IX awal Barat tanggal 24 Januari 2022 perihal Pengoperasian Wilayah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi Jawa Barat.

• Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

• Faktor Keberhasilan

1. Telah dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan studi/kajian setiap tahunnya dan ditindaklanjuti dengan proses penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
2. Peningkatan pelayanan penumpang dan kendaraan di pelabuhan penyeberangan dengan pemenuhan terhadap SPM Pelabuhan Penyeberangan;
3. Adanya dukungan Pemerintah dengan dianggarkannya operasional pengawasan sungai, danau, dan penyeberangan di wilayah Jawa Barat.

• Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

1. Pada beberapa lintasan, terkendala pada kekurangan fasilitas sandar (dermaga), sehingga kapal harus menunggu giliran untuk dapat sandar dan bongkar muat;

2. Dikarenakan BPTD Kelas II Jawa Barat hanya memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh sungai, danau, dan penyeberangan. Maka fungsi pengelolaan sungai, danau, dan penyeberangan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah kurang perawatan, sehingga kurang memberikan kenyamanan untuk pengguna jasa;
3. Kebutuhan angkutan penyeberangan terus meningkat, terutama untuk mengakomodir wilayah 3TP, mengakibatkan belum semua lintas yang diusulkan Pemerintah Daerah dapat diakomodir.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Dari layanan pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Triwulan IV Tahun 2024 diketahui bahwa :

= 15 SDP Yang Beroperasi Triwulan IV Tahun 2024 di BPTD Jabar

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(100\% - (15\% - 15\%))}{100\%} \times 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi Triwulan IV sebanyak Rp. 3.505.006.911,- dari total pagu sebesar Rp. 3.505.207.000,- atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Maroko, Bunder, Ranca Ririp dan Cililin dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 564.855.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 564.803.600,- atau 99,99%;
2. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Jangari, Leuwiorok, Kebon Coklat, Ciputri, Cilincing dan Babakan Garut (Waduk Cirata) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 830.322.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 830.264.460,- atau 99,99%;
3. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Servis Jatiluhur, Tanggul Usuman Banyu Biru, Parang Gemlong dan Galumpit dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 806.296.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 806.269.001,- atau 100%;

4. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Majingklak, Kalipucang, Pamorotan dan Cijulang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 674.640.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 674.576.950,- atau 99,99%;
5. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Situ Panjalu, Situ Gede dan Waduk Darma dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 629.094.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 629.092.900,- atau 100%;

- **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang**

Pada Tahun 2024 ini, kegiatan lingkup TSDP telah didukung dengan anggaran operasionalisasi pengawasan pelayanan untuk 15 lokasi/wilayah kerja di bagi menjadi 5 wilayah. Tentunya ke depan besar harapannya untuk terus kami tingkatkan pelayanannya dengan dukungan anggaran yang bukan hanya operasional pengawasannya namun juga pembangunan Pelabuhan penyeberangannya.

Dari hasil capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Triwulan IV Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang cukup memuaskan ini, BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasionalisasi Pelabuhan SDP secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Pelabuhan SDP. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Pelabuhan SDP baik berupa dukungan sarana dan prasarananya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Pelabuhan SDP baik berupa *ticketing online*, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan pelayaran Pelabuhan penyeberangan.

SK2 MENINGKATNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 2.1. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A;
2. IKK 2.2. Persentase penerapan SMART terminal tipe-A;
3. IKK 2.3. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP.

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

- **Definisi Indikator Kinerja**

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan,

pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

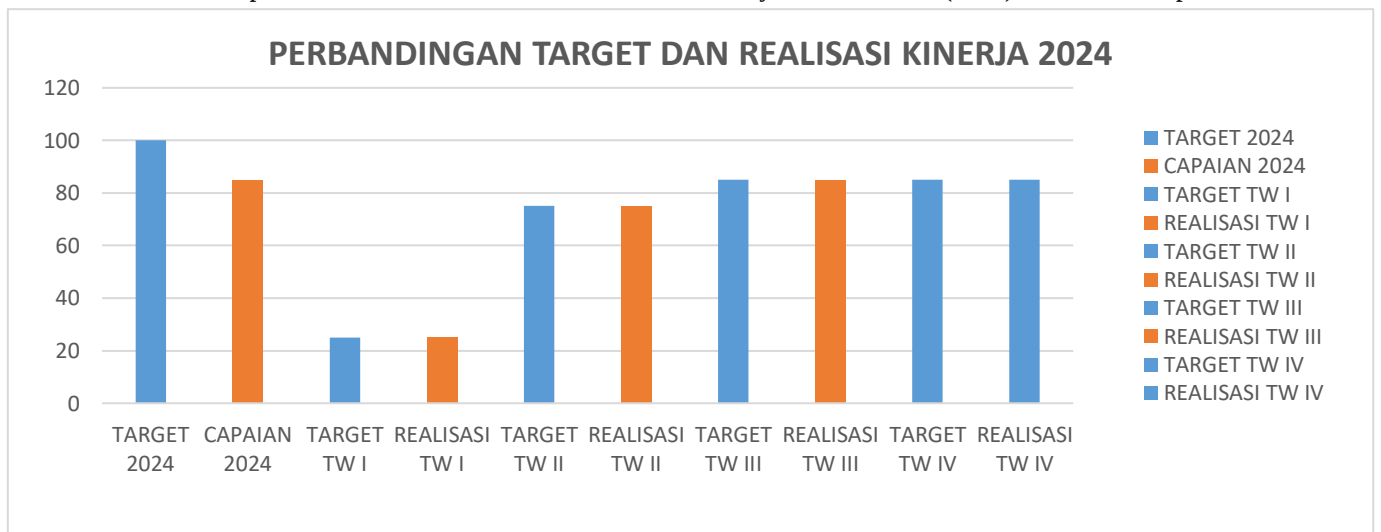
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi Standar Pelayanan}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SPM)}} \times 100\%$$

- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Tabel II.8. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

Tabel II.8 Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	100	25	25	75	75	85	85	100	100

- **Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

- **Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja**

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Peningkatan pelayanan Penumpang dan Kendaraan di Terminal Tipe-A dengan pemenuhan terhadap SPM Terminal tipe-A;
2. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk Pembangunan atau Pengembangan Terminal Tipe-A;
3. Konsistensi jumlah Terminal Tipe-A setiap tahunnya, tidak ada pengurangan yang diakibatkan oleh bencana alam.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya tidak sesuai dengan porsi kebutuhan, sehingga terdapat beberapa terminal yang memiliki jumlah personil yang cukup akan tetapi terdapat juga beberapa terminal yang masih kekurangan personil;
2. Terdapat *refocusing* anggaran terhadap Operasional Terminal Tipe-A;
3. Proses hibah lahan yang memakan waktu cukup lama dan sering terjadinya ketidaksesuaian lahan yang dihibahkan dengan luasan lahan eksisting. Sehingga berdampak terhadap proses revitalisasi di Terminal Tipe-A.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

$$= \frac{\text{Jumlah Pelayanan (6 Pelayanan x 8 Terminal)}}{\text{Jumlah Standar Pelayanan (6 Pelayanan x 10 Terminal)}} \times 100\%$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(100\% - (75\% - 75\%))}{100\%} \times 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 29.088.307.818,- dari total pagu sebesar Rp. 29.458.610.000,- atau sebesar 98,74 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Terminal Banjar dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.786.666.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.786.591.397,- atau 100%;
2. Operasional Terminal Indihiang (Tasikmalaya) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.922.360.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.922.302.681,- atau 100%;
3. Operasional Terminal Guntur Melati (Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.703.171.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.703.072.095,- atau 100%;
4. Operasional Terminal Subang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.791.467.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.791.401.006,- atau 100%;
5. Operasional Terminal Sudirman (Sukabumi) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.576.973.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.573.868.820,- atau 100%;
6. Operasional Terminal Ciakar (Sumedang) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.831.619.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.831.480.144,- atau 99,99%;
7. Operasional Terminal Kertawangunan (Kuningan) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.595.652.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.595.574.273,- atau 100%;

8. Operasional Terminal Harjamukti (Cirebon) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.290.559.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.290.375.719,- atau 99,99%;
9. Operasional Terminal Cikampek dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.405.710.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.405.623.265,- atau 99,99%;
10. Operasional Terminal Leuwipanjang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 6.054.433.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 5.868.350.549,- atau 93,92%.

- **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan datang**

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Triwulan IV Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kualitas pelayanan Terminal Tipe A melalui beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana dan prasarannya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Terminal baik berupa ticketing *online*, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan Bus dari Terminal secara *online*;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk naik Bus di Terminal.

IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

- **Definisi Indikator Kinerja**

Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antar persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara *online* (bobot 85%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 85%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu : vending machine, passenger barrier gate, vehicle barrier gate, CCTV, counting passenger, information *display*.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut :

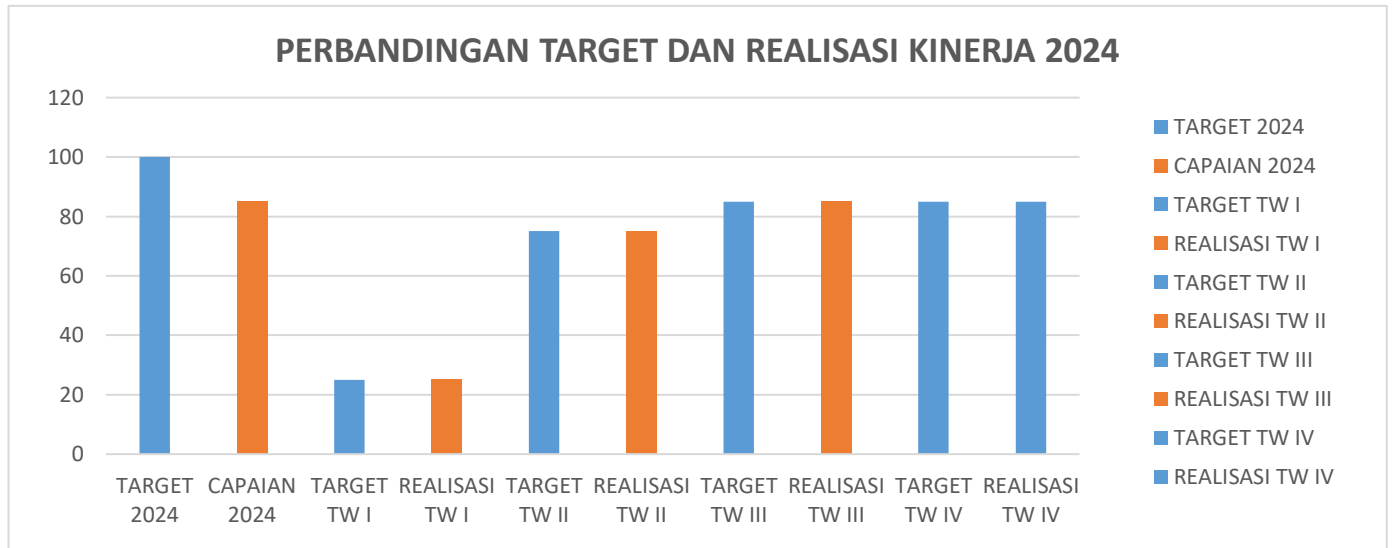
$$\text{Presentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasionalnya secara online}}{\text{Jumlah Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

$$= (\text{Presentase TTA Online} \times 50 \%) + (\text{Presentase TTA yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal})$$

- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Tabel II.9. Grafik Capaian IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A.

Tabel II.9 Capaian IKK Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A.



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	100	25	25	75	75	85	85	100	100

- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan.

• Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Peningkatan pelayanan Penumpang dan Kendaraan di Terminal Tipe-A dengan pemenuhan terhadap SPM Terminal tipe-A;
2. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk Pembangunan atau Pengembangan Terminal Tipe-A;
3. Konsistensi jumlah Terminal Tipe-A setiap tahunnya, tidak ada pengurangan yang diakibatkan oleh bencana alam.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya tidak sesuai dengan porsi kebutuhan, sehingga terdapat beberapa terminal yang memiliki jumlah personil yang cukup akan tetapi terdapat juga beberapa terminal yang masih kekurangan personil;
2. Terdapat *refocusing* anggaran terhadap Operasional Terminal Tipe-A;
3. Proses hibah lahan yang memakan waktu cukup lama dan sering terjadinya ketidaksesuaian lahan yang dihibahkan dengan luasan lahan eksisting. Sehingga berdampak terhadap proses revitalisasi di Terminal Tipe-A.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Dari layanan Persentase Pelaksanaan SMART Terminal Tipe-A Triwulan IV Tahun 2024 diketahui bahwa :

$$\text{Presentase TTA Online} = \frac{7,5}{10} \times 100\%$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan SMART Terminal Tipe A Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(100\% - (85\% - 85\%))}{100\%} \times 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun Anggaran 2024 per per 31 Desember 2024 telah terealisasi Triwulan IV sebanyak Rp. 29.088.307.818,- dari total pagu sebesar Rp. 29.458.610.000,- atau sebesar 98,74 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Terminal Banjar dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.786.666.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.786.591.397,- atau 100%;
2. Operasional Terminal Indihiang (Tasikmalaya) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.922.360.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.922.302.681,- atau 100%;
3. Operasional Terminal Guntur Melati (Garut) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.703.171.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.703.072.095,- atau 100%;
4. Operasional Terminal Subang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.791.467.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.791.401.006,- atau 100%;
5. Operasional Terminal Sudirman (Sukabumi) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.576.973.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.573.868.820,- atau 100%;
6. Operasional Terminal Ciakar (Sumedang) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.831.619.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.831.480.144,- atau 99,99%;
7. Operasional Terminal Kertawangunan (Kuningan) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.595.652.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.595.574.273,- atau 100%;
8. Operasional Terminal Harjamukti (Cirebon) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.290.559.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.290.375.719,- atau 99,99%;
9. Operasional Terminal Cikampek dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.405.710.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.405.623.265,- atau 99,99%;
10. Operasional Terminal Leuwipanjang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 6.054.433.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 5.868.350.549,- atau 93,92%.

- **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang**

Dari hasil capaian kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang baik ini, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kualitas pelayanan Terminal Tipe A melalui beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Terminal Tipe A baik berupa dukungan sarana dan prasarannya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;

2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Terminal baik berupa *ticketing online*, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan Bus dari Terminal secara *online*;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk naik Bus di Terminal.

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

- Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

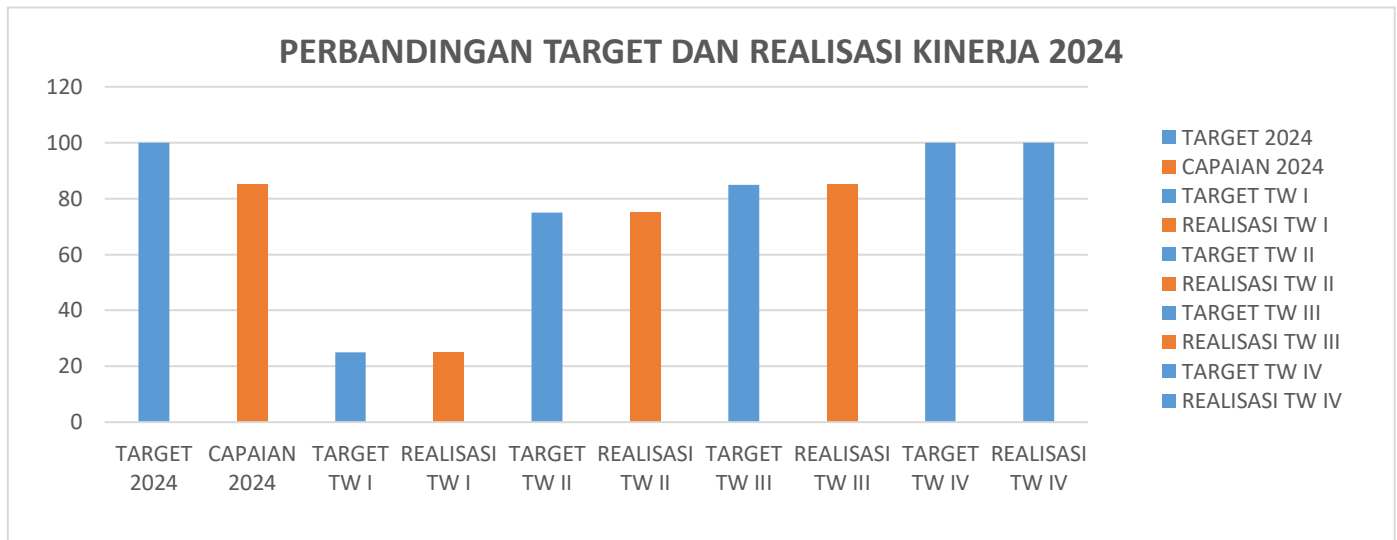
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang dipantau}} \times 100\%$$

- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 85% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 90%, maka capaian kinerja mencapai 85%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik II.10. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

Tabel II.10 Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP



TARGET 2023	CAPAIAN 2023	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	85	25	25	75	75	85	85	100	100

- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan:

1. PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan, hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan yang memiliki standar pelayanan minimum Pelabuhan penyeberangan, namun mulai Tahun 2022 ini pemantauan SPM mulai digencarkan dengan melibatkan BPTD. Untuk BPTD Kelas II Jawa Barat sendiri saat ini tengah diamanatkan 15 lokasi wilayah kerja Pelabuhan penyeberangan untuk dipantau secara langsung SPM Pelabuhan Penyeberangannya meskipun saat ini statusnya masih tercatat sebagai UPT di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.DRJD 3339 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pedoman Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Justifikasi Kepala BPTD Wilayah IX Jawa Barat tanggal 24 Januari 2022 perihal Pengoperasian Wilayah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi Jawa Barat.

- **Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja**

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Telah dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan studi/kajian setiap tahunnya dan ditindaklanjuti dengan proses penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
2. Peningkatan pelayanan penumpang dan kendaraan di pelabuhan penyeberangan dengan pemenuhan terhadap SPM Pelabuhan Penyeberangan;
3. Adanya dukungan Pemerintah dengan dianggarkannya operasional pengawasan sungai, danau, dan penyeberangan di wilayah Jawa Barat.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

1. Pada beberapa lintasan, terkendala pada kekurangan fasilitas sandar (dermaga), sehingga kapal harus menunggu giliran untuk dapat sandar dan bongkar muat;
2. Dikarenakan BPTD Kelas II Jawa Barat hanya memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh sungai, danau, dan penyeberangan. Maka fungsi pengelolaan sungai, danau, dan penyeberangan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah kurang perawatan, sehingga kurang memberikan kenyamanan untuk pengguna jasa;
3. Kebutuhan angkutan penyeberangan terus meningkat, terutama untuk mengakomodir wilayah 3TP, mengakibatkan belum semua lintas yang diusulkan Pemerintah Daerah dapat diakomodir.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Dari Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{12}{15} \times 100\%$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(100\% - (85\% - 85\%))}{100\%} \times 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 3.505.006.911,- dari total pagu Triwulan IV sebesar Rp. 3.505.207.000,- atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Maroko, Bunder, Ranca Ririp dan Cililin dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 564.855.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 564.803.600,- atau 99,99%;
2. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Dermaga Jangari, Leuwiorok, Kebon Coklat, Ciputri, Cilincing dan Babakan Garut (Waduk Cirata) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 830.322.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 830.264.460,- atau 99,99%;
3. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Servis Jatiluhur, Tanggul Usuman Banyu Biru, Parang Gemlong dan Galumpit dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 806.296.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 806.269.001,- atau 100%;

4. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Majingklak, Kalipucang, Pamorotan dan Cijulang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 674.640.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 674.576.950,- atau 99,99%;
5. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Danau Situ Panjalu, Situ Gede dan Waduk Darma dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 629.094.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 629.092.900,- atau 100%;

- **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang**

Pada Tahun 2024 ini, kegiatan lingkup TSDP telah didukung dengan anggaran operasionalisasi pengawasan pelayanan untuk 15 lokasi/wilayah kerja. Tentunya ke depan besar harapannya untuk terus kami tingkatkan pelayanannya dengan dukungan anggaran yang bukan hanya operasional pengawasannya namun juga pembangunan pelabuhan penyeberangannya.

Dari hasil capaian kinerja Presentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP Triwulan IV Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja maupun keuangan yang cukup memuaskan ini, BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan operasionalisasi Pelabuhan SDP secara optimal. Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan baik melalui revitalisasi/rehabilitasi maupun peningkatan sarana prasarana pendukung layanan Pelabuhan SDP.

BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan operasional Pelabuhan SDP melalui beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan penyelenggaraan operasional Pelabuhan SDP baik berupa dukungan sarana dan prasarananya maupun peningkatan kualitas pelayanannya;
2. Melaksanakan perbaikan sistem informasi Pelabuhan SDP baik berupa *ticketing online*, maupun informasi keberangkatan dan kedatangan;
3. Terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan pelayaran Pelabuhan penyeberangan.

SK4 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 3.1. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 3.2. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;
3. IKK 3.5. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;
4. IKK 7.b. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.

IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

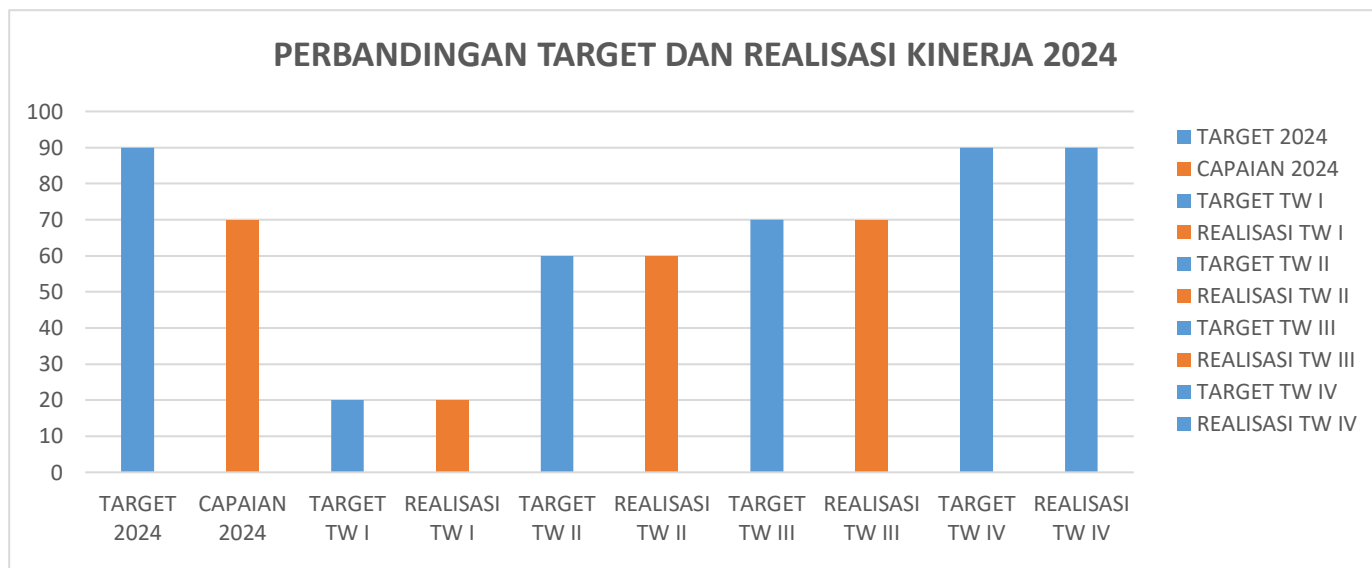
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Presentase Perlengkapan Jalan yang terpasang pada Tahun 2024}}{\text{Presentase Perlengkapan Jalan sesuai kondisi ideal pada Tahun 2024}} \times 100\%$$

- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 90% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 90%, maka capaian kinerja mencapai 70%. Pencapaian ini digambarkan pada Tabel II.11. Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.

Tabel II.11 Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
90	70	20	20	60	60	70	70	90	90

- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

- **Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja**

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Faktor kelaikan fungsi peralatan, karena kelaikan fungsi peralatan berperan sangat penting dalam pelaksanaan preservasi jalan. Ketidaklaikan peralatan dapat menimbulkan keterlambatan pelaksanaan;
2. Faktor ketepatan spesifikasi teknis peralatan, karena ketepatan spesifikasi teknis peralatan berhubungan dengan kapasitas, jenis, dan fungsi peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
3. Faktor ketersediaan dana (*cash flow*) kontraktor, karena ketersediaan dana mempengaruhi pembelian material dan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

1. Tidak adanya kemampuan PPK dalam pengendalian ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan, karena tingkat kemampuan PPK dalam mengendalikan pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknis akan menghasilkan mutu konstruksi yang baik;
2. Tidak patuhnya konsultan pengawas terhadap standar mutu, waktu, biaya, dan dokumen kontrak. Tingkat kepatuhan dan kompetensi konsultan dapat memonitoring hasil pekerjaan Kontraktor apakah sesuai dengan standar mutu, jadwal pelaksanaan, dan biaya sesuai dokumen kontrak;
3. Kontraktor tidak cepat beradaptasi terhadap perubahan/addendum kontrak, karena semakin cepat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan addendum kontrak, pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai addendum kontrak yang berlaku.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Triwulan IV Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{70\%}{90\%} \times 100\%$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Tahun 2024 yaitu sebesar 72,22% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(90\% - (2600\% - 90\%))}{90\%} \times 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap kegiatan Presentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi Triwulan IV sebanyak Rp. 40.559.817.068, dari total pagu sebesar Rp. 40.564.014.000 atau sebesar 99,99 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Bantuan teknis perlengkapan jalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 10.500.000.000,- dan realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2024 mencapai Rp. 10.499.990.000,- atau 100%;
2. Perlengkapan Jalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 26.424.371.000,- dan realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2024 mencapai Rp. 26.420.702.068,- atau 99,99%.

- **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang**

Sesuai amanat Undang-undang No 22 Tahun 2009 pasal 25 disebutkan bahwa “ Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan untuk

- a. Jalan Nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat;
- b. Jalan Provinsi merupakan tanggung jawan Pemerintah Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten/Kota dan jalan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- d. Jalan Tol menjadi tanggungjawab badan usaha jalan tol.

Dari hasil capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Triwulan IV Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja yang baik meskipun belum didukung dengan realisasi anggaran yang masih terkendala adanya perubahan juklak/juknis pengadaan perlengkapan jalan.

BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja pelaksanaan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang menuju kondisi ideal melalui upaya :

1. Melaksanakan percepatan pengadaan bantuan teknis perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan di Jawa Barat yang berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di sejumlah ruas jalan wilayah Jawa Barat berdampak pada terwujudnya optimalisasi penerapan skema manajemen keselamatan LLAJ di tahun-tahun yang akan datang;
2. Mendukung upaya perbaikan kualitas pengadaan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi pemasangan perlengkapan jalan guna menunjang pemetaan pemasangan di titik-titik yang merupakan prioritas jalan nasional.

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

- Definisi Indikator Kinerja

Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

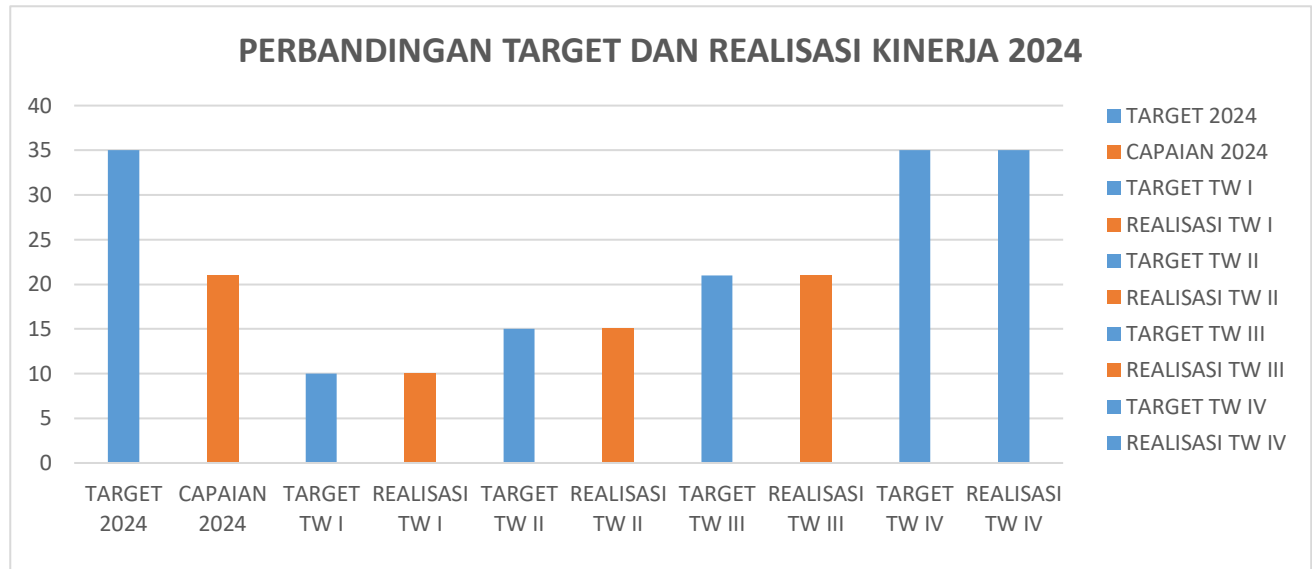
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dengan satuan ukur presentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran pada UPPKB di BPTD Kelas II Jawa Barat Tahun 2024}}{\text{Jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk pada UPPKB di BPTD KELAS II Jawa Barat Tahun 2024}} \times 100\%$$

- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan III Tahun 2024 sebesar 35% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 35%, maka capaian kinerja mencapai 35%. Pencapaian ini digambarkan pada Tabel II.12. Grafik Capaian IKK Presentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.

Tabel II.12 Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
35	21	10	10	15	15	21	21	35	35

- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:
 - a. Tata cara pemuatan barang;
 - b. Dimensi Kendaraan Angkutan Barang;
 - c. Tekanan Seluruh Sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
 - d. Dokumen Angkutan Barang;
 - e. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
 - f. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

- **Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja**

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Pengawasan kendaraan Angkutan Barang di UPPKB dengan menggunakan aplikasi JTO;
2. Pengadaan *weigh-in-motion* (WIM) di UPPKB Balonggandu dan Losarang;
3. Pelaksanaan sistem manajemen mutu UPPKB (ISO 9001:2005).

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

1. Sistem operasional penimbangan pada UPPKB walau dirasa cukup baik, namun masih memiliki kesan sedikit tidak efektif. Yaitu dapat terlihat dalam pengoperasian UPPKB terhitung kendaraan yang melintasi UPPKB tidak berbanding lurus dengan yang masuk ke dalam UPPKB untuk melakukan penimbangan. Sehingga dapat terbilang fungsi UPPKB untuk mengurangi pelanggaran pada angkutan barang di jalan, tidak cukup berjalan dengan baik atau tidak efektif;
2. Kendaraan angkutan barang yang melintas di UPPKB tidak selalu dapat diarahkan untuk masuk kedalam area penimbangan kendaraan karena kendaraan yang melaju cepat, sehingga jika menghentikannya atau memperlambat lajunya secara mendadak akan menimbulkan kemungkinan bahaya atau bahkan kecelakaan lalu lintas;
3. Alat penimbangan kendaraan bermotor yang hanya 1 (satu) jalur sehingga terbentuknya antrian yang panjang di dalam area bahkan hingga ke luar area UPPKB yang dapat menimbulkan kemacetan.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

$$= \frac{7.150 \text{ Pelanggaran}}{45.500 \text{ Kendaraan}} \times 100\%$$

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada Triwulan IV Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran kendaraan yang memasuki area UPPKB masih relatif tinggi.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(35\% - (21\% - 35\%))}{35\%} \times 100\%$$

- **Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap kegiatan Persentase Triwulan IV Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 10.842.348.790,- dari total pagu sebesar Rp. 10.844.049.000,- atau sebesar 99,98 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Operasional UPPKB Balonggandu dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.294.061.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.293.561.637,- atau 99,98%;
2. Operasional UPPKB Losarang dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.253.751.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 2.253.480.094,- atau 99,99%;
3. Operasional UPPKB Gentong dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.657.040.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.656.898.737,- atau 99,99%;
4. Operasional UPPKB Tomo dengan dukungan anggaran sebesar

Rp. 1.679.726.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.679.562.866,- atau 99,99%;

5. Operasional UPPKB Cibaragalan dengan dukungan anggaran sebesar

Rp. 1.567.710.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.567.435.648,- atau 99,98%;

6. Operasional UPPKB Kemang dengan dukungan anggaran sebesar

Rp. 1.343.093.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 1.342.832.542,- atau 99,98%;

7. Operasional UPPKB Bojong dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 48.668.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 48.577.166,- atau 99,81%.

- **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang**

Dari hasil capaian kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2024 yang menunjukkan realisasi capaian kinerja yang kurang memuaskan ini, BPTD Kelas II Jawa Barat akan terus meningkatkan kinerja untuk senantiasa bisa menurunkan angka persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat melalui upaya:

1. Mewujudkan Indonesia bebas ODOL Tahun 2024 dengan cara melakukan pemasangan fasilitas pendukung sistem jembatan timbang *online*, pengembangan integrasi JTO dengan sistem *weight in motion* dan sistem ETLE milik Kepolisian;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengoperasian dan pengelolaan UPPKB terkait dengan pelanggaran ODOL;
3. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala, dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- **Definisi Indikator Kinerja**

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan

yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

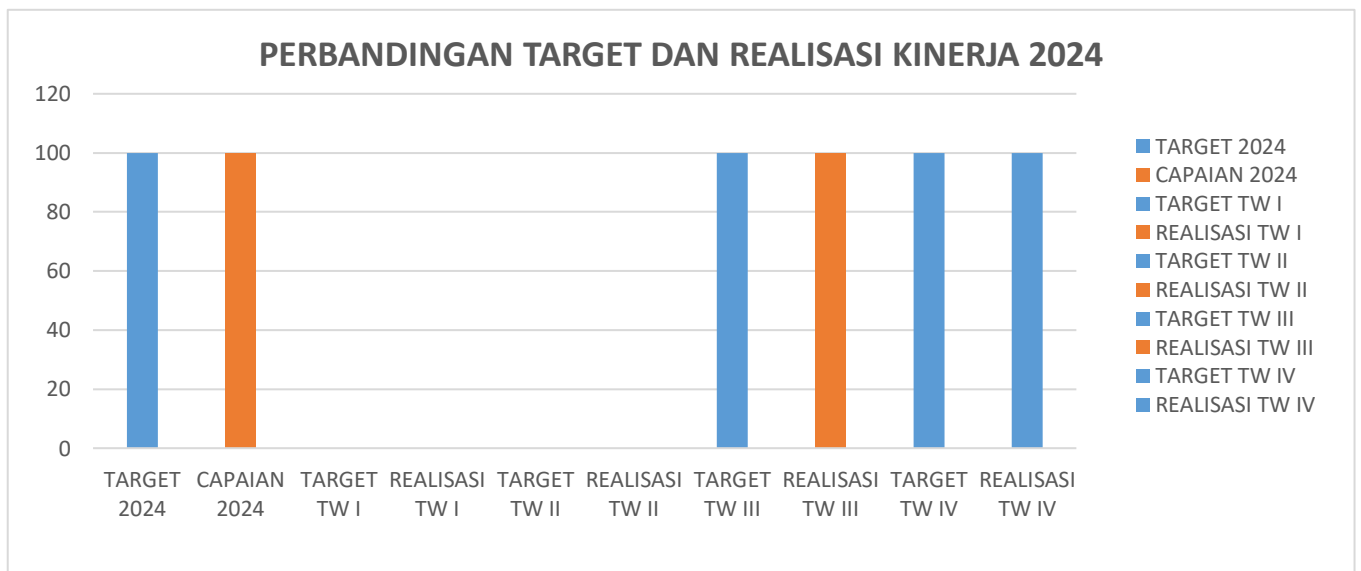
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan dengan satuan ukur jumlah digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ}$$

- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan pada Triwulan IV Tahun 2024 memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% Telah Selesai di laksanakan dubulan Sempember serta rencana program yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pencapaian ini digambarkan pada Tabel II.15. Grafik Capaian IKK jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan.

Tabel II.15 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Jalan



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
100	100	0	0	0	0	100	100	100	100

- **Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- **Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja**

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

- **Faktor Keberhasilan**

Terdapat target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Jalan, namun kegiatan belum dilaksanakan. Sehingga tidak dapat menentukan faktor keberhasilan atas indikator tersebut.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

Terdapat target kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Jalan, namun kegiatan belum dilaksanakan. Sehingga tidak dapat menentukan faktor kegagalan atau potensi kegagalan atas indikator tersebut.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan jalan pada Triwulan IV Tahun 2024 memiliki persentase realisasi kinerja sebesar 100% dikarenakan kegiatan belum dilaksanakan.

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Jalan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember telah terealisasi sebanyak Rp. 350.000.000 dari total pagu sebesar Rp. 350.000.000,- atau sebesar 100%.

- **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang**

Setelah proses revisi sumber dana kegiatan, kami akan segera melaksanakan kegiatan tersebut untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. Adapun beberapa upaya yang akan kami laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi / memberikan edukasi kepada para stakeholders terkait mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
2. Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan pekan nasional keselamatan angkutan jalan;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan.

SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 5.1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- **Definisi Indikator Kinerja**

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi *e-performance*.

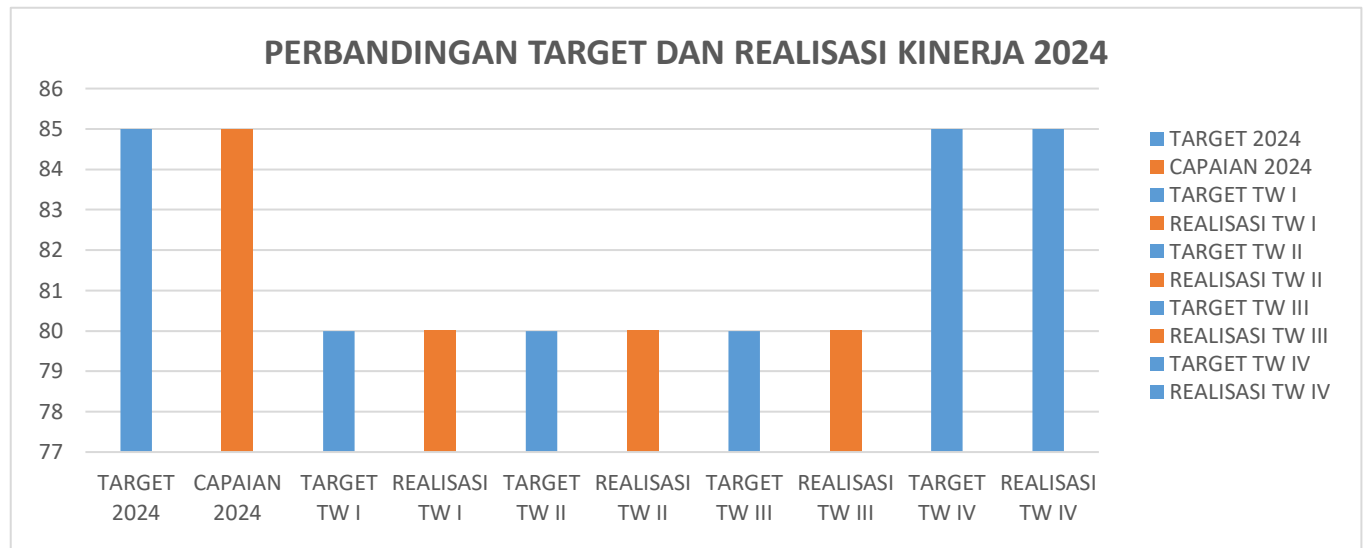
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan dispilin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Capaian Kinerja kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan IV Tahun 2024 mempunyai nilai 85 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan nilai 85, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Tabel II.19. Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

Tabel II.19 Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	REALISASI TW III	TARGET TW III	REALISASI TW IV	TARGET TW IV
85	85	80	80	80	80	80	80	85	85

- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan dukungan teknis.

• Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi aset Barang Milik Negara (BMN) di BPTD Kelas II Jawa Barat;
2. Terselenggaranya bimbingan teknis pengoperasian alat penimbangan kendaraan bermotor, bimbingan teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor;
3. Terselenggaranya monitoring penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK) dan Reformasi Birokrasi.

- **Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan**

1. Tidak terselenggaranya monitoring dan evaluasi aset Barang Milik Negara (BMN) di Kelas II Jawa Barat;
2. Tidak adanya bimbingan teknis pengoperasian alat penimbangan kendaraan bermotor, bimbingan teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor;
3. Tidak terselenggaranya monitoring penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK) dan Reformasi Birokrasi.

- **Perhitungan Realisasi Kinerja**

No	URAIAN		BOBOT	Nilai
A	Ketetapan Waktu Pelaksanaan Dokumen Perencanaan		25%	20
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	10%	
	2	Perjanjian Kinerja	5%	
	3	Pengisian input <i>e-planning</i>	5%	
	4	Pengisian input <i>e-performance</i>	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	20
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
	2	Kompetensi	10%	
	3	Kinerja	8%	

	4	Disiplin	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%	20
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	20

- **Perhitungan Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(85\%-(80\%-80\%))}{85\%} \times 100\%$$

- **Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan**

Realisasi anggaran dukungan terhadap Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 10.636.365.123,- dari total pagu sebesar Rp. 10.637.426.000,- atau sebesar 99,99% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 10.637.426.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 10.636.365.123,- atau 99,99%;

- **Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang**

Pada Triwulan IV Tahun 2024 ini Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat telah memenuhi target yang ditetapkan, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan selalu terus berupaya meningkatkan aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat melalui:

1. Melaksanakan sosialisasi / memberikan edukasi kepada para pegawai tentang pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan dukungan teknis;
2. Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan dukungan teknis;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan

SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. IKK 6.1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

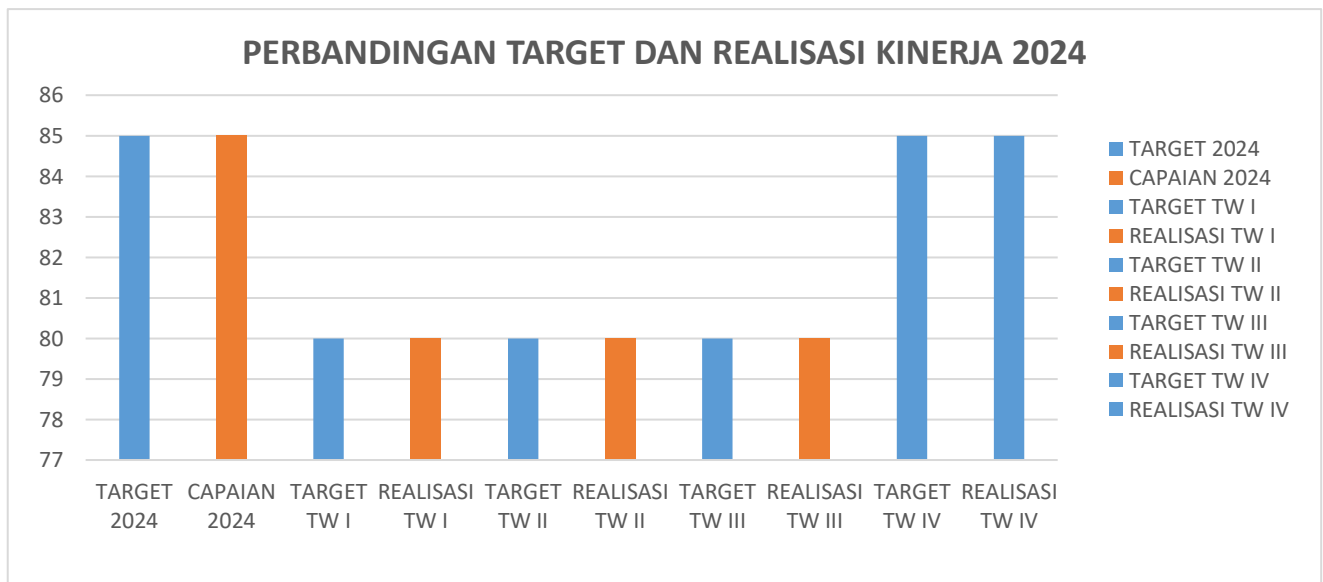
- Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun 2024 mempunyai nilai 85 jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan nilai 80, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Tabel II.20. Grafik Capaian IKK Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Tabel II.20. Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



TARGET 2024	CAPAIAN 2024	TARGET TW I	REALISASI TW I	TARGET TW II	REALISASI TW II	TARGET TW III	REALISASI TW III	TARGET TW IV	REALISASI TW IV
85	85	80	80	80	80	80	80	85	85

- Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Adapun pelaksanaan tupoksi ini meliputi beberapa aspek penunjang penyelenggaraan perkantoran.

• Kronologi Target pada Perjanjian Kinerja

Penetapan target dilakukan setelah indikator sasaran kinerja ditetapkan. Target kinerja dirumuskan pada setiap indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan target kinerja tersebut ditetapkan pula rencana alokasi anggaran yang dibutuhkan. Rencana anggaran tersebut disusun berdasarkan pada target kinerja yang akan dihasilkan. Rencana pendanaan dilakukan untuk setiap indikator kinerja pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran atas indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. sehingga terdapat target yang ditetapkan atas indikator tersebut.

• Faktor Keberhasilan

1. Adanya monitoring dan evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala, dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;
2. Adanya optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target rencana penarikan yang ada;
3. Adanya pengawasan pada kegiatan layanan perkantoran.

• Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

1. Tidak adanya monitoring dan evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala, dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;
2. Tidak adanya optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target rencana penarikan yang ada;
3. Tidak adanya pengawasan pada kegiatan layanan perkantoran.

- Perhitungan Realisasi Kinerja

No	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV		25%	20
	1	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III	15%	
	2	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon IV	10%	
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	20
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	40
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner berikut :

**KUISIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN**

SATUAN KERJA BPTD WILAYAH IX JAWA BARAT

NAMA :
JABATAN :
NIP :

A. PERKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atas tingkat pelayanan Layanan Perkantoran dengan indikator 1 (Tidak Nyaman/Buruk), 2 (Kurang Nyaman/Buruk), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

No	ASPEK PENILAIAN /URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						

Ket : diisi dengan tanda centang (✓) pada pilihan persepsi

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuesioner berikut :

**KUISIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN**

SATUAN KERJA BPTD WILAYAH IX JAWA BARAT

NAMA :
JABATAN :
NIP / NIK :

A. PERKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atas tingkat pelayanan Layanan Perkantoran dengan indikator 1 (Tidak Nyaman/Buruk), 2 (Kurang Nyaman/Buruk), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

No	ASPEK PENILAIAN /URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						

Ket : diisi dengan tanda centang (✓) pada pilihan persepsi

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$X = \frac{\text{Jumlah kursi dan meja di kantor}}{\text{Jumlah pegawai (pejabat dan staf)}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$Y = \frac{\text{Jumlah PC atau laptop di kantor}}{\text{Jumlah pegawai (pejabat dan staf)}} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$Z = \frac{\text{Rata-Rata kecepatan internet (unduh) di kantor}}{\text{Standar kecepatan internet (unduh) di kantor}} \times 100\%$$

Note:

- *) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai - Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihhan + Security
- **) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan Pengunduhan (*download*) yang diukur pada jam kantor (08.00 – 16.00 WIB) Pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi PC/laptop
- ***) Standar kecepatan internet (unduh) di kantor sebesar 5 Mbps

• Perhitungan Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(85\% - (80\% - 80\%))}{85\%} \times 100\%$$

• Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Realisasi anggaran dukungan terhadap Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 telah terealisasi sebanyak Rp. 49.988.942.878,- dari total pagu sebesar Rp. 50.114.111.000,- atau sebesar 99,% dengan rincian sebagai berikut :

1. Layanan Perkantoran dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 6.987.638.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 6.987.117.979,- atau 99,99%;
2. Layanan Perkantoran / Gaji dukungan anggaran sebesar Rp. 43.126.473.000,- dan realisasi Triwulan IV mencapai Rp. 43.001.824.899,- atau 99,71%.

- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Pada Triwulan IV Tahun 2024 ini Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan perkantoran telah memenuhi target yang ditetapkan, namun BPTD Kelas II Jawa Barat akan selalu terus berupaya meningkatkan aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat melalui:

1. Melaksanakan sosialisasi / memberikan edukasi kepada para pegawai tentang pentingnya menjaga kualitas penyelenggaraan dukungan teknis;
2. Melaksanakan evaluasi efektifitas penyelenggaraan dukungan perkantoran;
3. Mendorong perbaikan sistem informasi yang menunjang kegiatan.

II.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Revisi DIPA ke 1 tanggal 18 Januari 2024 bahwa BPTD Kelas II Jawa Barat mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 171.650.311.000,- dengan realisasi anggaran posisi 31 Desember 2024 adalah Rp. **Rp. 229.163.753.000,-** atau sebesar 98,76 %.

II.5 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024

II.5.1 Pagu Anggaran

Pagu Anggaran Awal Tahun 2024 Posisi 1 Januari 2024 sebesar Rp. 170.886.213.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024

RM	:	Rp.	171.650.311.000,-
PNBP	:	Rp.	21.041.000.000,-
SBSN PBS	:	Rp.	-
TOTAL	:	Rp.	170.886.213.000,-

- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024

Belanja Pegawai	:	Rp.	36.754.270.000,-
Belanja Barang	:	Rp.	66.637.471.000,-
Belanja Modal	:	Rp.	67.494.472.000,-
Total	:	Rp.	170.886.213.000,-

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA BPTD Kelas II Jawa Barat Triwulan IV TA. 2024 pada Revisi DIPA ke 13 tanggal 20 Desember 2024 sehingga total pagu pada DIPA BPTD Kelas II Jawa Barat adalah sebesar **Rp. 229.163.753.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024

RM	:	Rp.	178.236.914.000,-
PNBP	:	Rp.	50.926.839.000,-
SBSN PBS	:	Rp.	-
TOTAL	:	Rp.	229.163.753.000,-

- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024

Belanja Pegawai	:	Rp.	43.126.473.000,-
Belanja Barang	:	Rp.	113.631.389.000,-
Belanja Modal	:	Rp.	72.405.891.000,-
Total	:	Rp.	229.163.753.000,-

- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 2608 4139 0973 1684 pada tanggal 18 Januari 2024 (Revisi ke-1);
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 3022 2450 9672 4524 pada tanggal 31 Januari 2024 (Revisi ke-2).
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 3022 2450 9672 4524 pada tanggal 1 Februari 2024 (Revisi ke-3).
- d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 3022 2450 9672 4524 pada tanggal 23 April 2024 (Revisi ke-4).
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 9203 4779 3057 0102 pada tanggal 21 Juni 2024 (Revisi ke-5).
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 4729 2095 1697 5561 pada tanggal 21 Agustus 2024 (Revisi ke-6).
- g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 8672 7304 9377 0455 pada tanggal 30 Agustus 2024 (Revisi ke-7).
- h. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 6213 0382 4974 1910 pada tanggal 08 Oktober 2024 (Revisi ke-8).
- i. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 8047 6892 7042 6832 pada tanggal 13 November 2024 (Revisi ke-9).
- j. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 5900 9391 1050 8624 pada tanggal 16 November 2024 (Revisi ke-10).
- k. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 4154 4091 9936 9402 pada tanggal 27 November 2024 (Revisi ke-11).
- l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 0062 7832 2001 3883 pada tanggal 18 November 2024 (Revisi ke-12).
- m. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403849/2024 kode *digital stamp* : 0062 7832 2001 3883 pada tanggal 20 Desember 2024 (Revisi ke-13).

II.5.2 Anggaran Tahun 2024

• Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024

NO	KETERANGAN	RM	PNBP	SBSN	TOTAL ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pagu Awal	171.650.311.000	21.041.000.000	-	192.691.311.000
2.	Revisi ke-01	171.650.311.000	21.041.000.000	-	192.691.311.000
3.	Revisi ke-02	171.650.311.000	21.041.000.000	-	192.691.311.000
4.	Revisi ke-03	171.650.311.000	21.041.000.000	-	192.691.311.000
5.	Revisi ke-04	171.650.311.000	21.041.000.000	-	192.691.311.000
6.	Revisi ke-05	174.032.133.000	21.041.000.000	-	195.073.133.000
7.	Revisi ke-06	174.696.533.000	29.365.089.000	-	204.061.622.000
8.	Revisi ke-07	179.386.914.000	29.365.089.000	-	208.752.003.000
9.	Revisi ke-08	179.386.914.000	51.096.839.000	-	230.483.753.000
10.	Revisi ke-09	178.936.839.000	50.926.839.000	-	229.863.753.000
11.	Revisi ke-10	178.936.914.000	50.926.839.000	-	229.863.753.000
12.	Revisi ke-11	178.236.914.000	50.926.839.000	-	229.163.753.000
13.	Revisi ke-12	178.236.914.000	50.926.839.000	-	229.163.753.000
14.	Revisi ke-13	178.236.914.000	50.926.839.000	-	229.163.753.000

Sumber: Layanan SatuDJA

• Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN IV TA. 2024
Belanja Pegawai	Rp. 36.754.270.000,-	Rp. 6.372.203.000	Rp. 43.126.473.000,-
Belanja Barang	Rp. 66.637.471.000,-	Rp. 946.993.918.000	Rp. 113.631.389.000,-
· RM	Rp. 66.637.471.000,-	-	Rp. 66.637.471.000,-
- PNBP	-	-	-
Belanja Modal	Rp. 67.494.472.000,-	Rp. 4.911.419.000	Rp. 72.405.891.000,-
· RM	Rp. 46.244.472.000,-	-	Rp. 46.244.472.000,-
· PNBP	Rp. 21.250.000.000,-	Rp. 29.676.839.000	Rp. 50.926.839.000,-
· SBSN	-	-	-
TOTAL	Rp. 170.886.213.000,-	Rp. 58.277.540.000	Rp. 229.163.753.000,-

Sumber : Layanan SatuDJA dan OM SPAN

- **Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024**

Kode Nama Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW IV
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	7.038.965.000	28.703.927.000
4638 Pelayanan Transportasi Darat	56.511.986.000	76.117.906.000
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	57.999.561.000	63.198.191.000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.937.500.000	11.029.618.000
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.418.931.000	6.987.638.000
4671 Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	36.754.270.000	43.126.473.000
Jumlah	170.886.213.000	229.163.753.000

II.5.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 - 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi Triwulan IV	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	138.187.896.000,-	162.636.267.000,-	158.485.125.863,-	97,32%
2	2021	167.696.923.000,-	202.741.892.000,-	200.076.845.134,-	98,42%
3	2022	159.993.635.000,-	159.833.982.000,-	65.760.269.887,-	98,89%
4	2023	170.886.213.000,-	170.886.213.000,-	170.584.147.362,-	97,64%
5	2024	170.886.213.000,-	229.163.753.000,-	220.193.027.959,-	99,56%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap Triwulan IV di Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 menunjukan angka presentase yang berbeda-beda, seperti pada Triwulan IV Tahun 2020 mempunyai besaran realisasi mencapai 97,34 % namun pada Triwulan III Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2020 yakni sebesar 99,56%. Di Triwulan IV Tahun 2024 menunjukan progress besaran realisasi yang terbilang cukup tinggi dengan besaran mencapai Rp. 220.193.027.959,- atau sebesar 99,56% dari pagu sebesar Rp. 229.163.753.000,-. Di Triwulan IV Tahun 2024 menunjukan progress besaran realisasi yang lebih rendah dibanding Triwulan III Tahun 2023 dengan besaran Rp. 170.584.147.362,- atau sebesar 97,64% dari pagu sebesar Rp. 170.886.213.000,-

II.6 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

II.6.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024

(dalam ribuan rupiah)

No	Kode Nama kegiatan	Pagu awal	Triwulan IV		
			Pagu	Realisasi Rp.	%
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	7.038.965.000	28.703.927.000	25.865.992.735	90,11%
2	Pelayanan Transportasi Darat	56.511.986.000	76.117.906.000	76.017.887.029	99,87%
3	4639.Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	57.999.561.000	63.198.191.000	57.704.845.260	91,31%
4	4640.Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.937.500.000	11.029.618.000	10.636.365.123	96,43%
5	4671.Pengelolaan perencanaan,Keuangan,BMN,dan Umum Transportasi Darat	36.754.270.000	43.126.473.000	42.980.419.833	99,66%
6	4670.Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.418.931.000	6.987.638.000	6.987.517.979	100,00%
JUMLAH		170.886.213.000	229.163.753.000	220.193.027.959	96,09%

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 220.193.027.959,-** atau mencapai **96,09%** dari total pagu sebesar **Rp.229.163.753.000,-**

II.6.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu TW IV (Rp.)	Realisasi TW IV	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	43.126.473.000	42.980.473.000	99,66
2	Belanja Barang	113.631.389.000	110.388.192.024	97,15
3	Belanja Modal	72.405.891.000	66.824.416.102	92,29
TOTAL		229.163.753.000	220.193.027.959	96,09

II.6.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per sumber dana pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu TW IV (Rp.)	Realisasi TW IV	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	178.236.914.000	169.412.242.065	1,08
2	PNBP	50.926.839.000	50.780.785.833	0,00
3	SBSN	-	-	0,00
TOTAL		229.163.753.000	220.193.027.959	96,09

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana pada Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan tren yang positif walaupun belum maksimal, termasuk belum adanya pencairan anggaran yang bersumber dana PNBP dikarenakan sedang proses pembukaan blokir anggaran.

II.7 ANALISIS DANA YANG TIDAK TERSERAP OLEH UNIT KERJA

II.7.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan penggunaan sumber daya program per Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Triwulan IV		
		%Capaian Rata-Rata Kinerja Kegiatan	% Capaian Keuangan	Efisiensi Posisi TW IV
SK 1	Meningkatnya Konektifitas Transportasi Darat dan Ketepaduan antar Moda Transportasi	99,99%	99,94%	99,94%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	99,99%	99,92%	99,92%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	99,99%	99,99	99,99
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	100,00%	100%	100%
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	100,00%	100%	100%
TOTAL		99,56%	99,56%	99,56%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,65% dengan realisasi anggaran sebesar 99,56% menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran sebesar 99,56%.

II.7.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh BPTD Kelas II Jawa Barat berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU TW IV	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	43.126.473.000	42.980.419.833	146.053.167
2	Belanja Barang	113.631.389.000	110.388.192.024	3.243.196.976
3	Belanja Modal	72.405.891.000	66.824.416.102	5.581.474.898
TOTAL		229.163.753.000	220.193.027.959	8.970.725.041

- Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	178.236.914.000	169.412.242.065	8.824.671.935
2	PNBP	50.926.839.000	50.780.785.833	146.053.167
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		229.163.753.000	220.193.027.959	8.970.725.041

Dari total pagu anggaran BPTD Kelas II Jawa Barat sebesar Rp 229.163.753.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp 220.193.027.959,- (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 99,56% sehingga total dana yang belum terserap di lingkungan BPTD Kelas II Jawa Barat adalah sebesar

Rp 8.970.725.041,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Puluh Satu Rupiah)

II.7.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitupula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber manusia yang ada didalamnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan bahwa personil Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPTD Kelas II Jawa Barat (Kantor Induk) berjumlah 59 pegawai.

Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPTD Kelas II Jawa Barat hanya didukung oleh ASN yang berada di Kantor Induk sebanyak 59 pegawai.

Dari gambaran di atas, dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya ASN manusia pada BPTD Kelas II Jawa Barat (Kantor Induk) di dominasi oleh kualifikasi pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	13 orang
2	Strata Satu (S1) / Diploma IV	35 orang
3	Diploma III	7 orang
4	Diploma I	1 orang
5	SMA	3 orang

Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, BPTD Kelas II Jawa Barat melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke Biro Kepegawaian, serta pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

II.8 Hambatan dan Kendala

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami hambatan kendala yang terlalu signifikan, berbeda dengan Tahun 2020 dimana pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan seperti banyak pekerjaan yang mengalami kemunduran jadwal pelaksanaan karena pembatasan aktivitas, dll. Pada Tahun 2024 ini memang kita masih dihadapkan dengan kondisi endemi namun berkaca pada pengalaman pada tahun sebelumnya kita relatif masih bisa mengantisipasi kondisi serta kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi. Namun pada akhirnya, kami BPTD Kelas II Jawa Barat dapat menuntaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi target kinerja pada Triwulan IV ini maupun pencapaian realisasi anggaran yang memuaskan.

BAB III

PENUTUP

III.1 PENUTUP

Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya organisasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

III.2 RINGKASAN CAPAIAN

LMCK Triwulan IV Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra Tahun 2020-2024, yakni merupakan pelaksanaan tahun keempat, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2024 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$) dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan terealisasi sebesar 90% dari target Tahun 2024 90%;
 - b. Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi terealisasi sebanyak 10 dari target 10 Lokasi;
 - c. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sebesar 90% dari target 90%;
 - d. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebanyak 15 dari target 15 Lokasi;
 - e. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A sebesar 100% dari target 100%;
 - f. Persentase penerapan SMART terminal tipe A sebesar 100% dari target 100%;
 - g. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP sebesar 100% dari target 100%;
 - h. Persentase Perlangkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebesar 90% dari target 90%;
 - i. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 35% dari target 35%;

- j. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebanyak 100 dari target 100 Orang;
 - k. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan realisasi nilai 85 dari target nilai 85;
 - l. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan realisasi nilai 85 dari target nilai 85.
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang professional, akuntabel, transparan, serta efektif dan efisien dengan pelayanan yang prima;
 3. Realisasi pencapaian kinerja BPTD Kelas II Jawa Barat sangat baik, dengan rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan pada Triwulan IV ini sebesar 99,56% dari target keseluruhan sasaran kegiatan Tahun 2024.

III.3 HASIL EVALUASI, REKOMENDASI DAN UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV TAHUN 2024			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	90	90	90%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan/Kepala Seksi Sarana
		IKK 1.3	Jumlah terminal Tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	10	100%	TERCAPAI	Memastikan Terminal Tipe-A yang telah beroperasi mendapatkan dukungan operasional SDM dan anggaran yang memadai.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	90	90	90%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan penyeberangan bagi masyarakat di daerah-daerah untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan/Kepala Seksi Sarana

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV TAHUN 2024			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	15	15	100%	TERCAPAI	Memastikan Pelabuhan SDP yang telah beroperasi mendapatkan dukungan operasional SDM dan anggaran yang memadai. -	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan Prasarana pendukung pelaksanaan Standar pelayanan minimum Terminal Tipe-A dapat tersedia dengan baik.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe A	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan Prasarana pendukung penerapan SMART Terminal Tipe-A dapat tersedia dengan baik.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan Prasarana pendukung pelaksanaan Standar pelayanan minimum di Pelabuhan SDP dapat tersedia dengan baik.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Trasnportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlangkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	90	90	90	100%	TERCAPAI	Memastikan Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terus dilakukan peningkatan guna menuju kondisi ideal yang diharapkan	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
			IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35	35	35	100%	TERCAPAI	Mendorong upaya kesadaran para pengusaha Angkutan Barang untuk secara aktif mendukung terwujudnya penurunan jumlah angka pelanggaran pada UPPKB.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Lokasi	100	100	100	100%	TERCAPAI	Memastikan Masyarakat tersosialisasi tentang keselamatan tentang transportasi jalan yang diharapkan	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
4	SK5	Meningkatnya Pelayanan Trasnportasi Darat	IKK 5.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	85	85	85	100%	TERCAPAI	Memastikan Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan menuju kondisi ideal yang diharapkan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat penyelenggaraan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85	85	85	100%	TERCAPAI	Memastikan Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, BMN menuju kondisi ideal yang diharapkan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

**~PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
UPT-BPTD~
KELAS II JAWA BARAT
2024**

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan

DEFINISI
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.
SUMBER DATA
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat
CARA MENGHITUNG
$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$ RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya
SATUAN
% (persentase)
PENANGGUNG JAWAB
BPTD
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

DEFINISI
Terminal Tipe-A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan, Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di jalan.
Terminal tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
SUMBER DATA
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat
CARA MENGHITUNG
<i>IKK1.3 = Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi</i>
SATUAN
Lokasi
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

DEFINISI
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.
SUMBER DATA
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat
CARA MENGHITUNG
$IKK\ 1.5 = \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$
SATUAN
% (Persentase)
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

DEFINISI
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.
SUMBER DATA
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan - Balai Pengelola Transportasi Darat
CARA MENGHITUNG
$IKK1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun } (n)$
SATUAN
Lokasi
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

DEFINISI
Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
SUMBER DATA
• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (rekap hasil) • Balai Pengelola Transportasi Darat (pelaksana survei)
CARA MENGHITUNG
$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Jalan
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.2	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A

DEFINISI

Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item, yaitu : vending machine, passenger barrier gate, vehicle barrier gate, CCTV, counting passenger, information display.

SUMBER DATA

- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat

CARA MENGHITUNG

$$\text{Persentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

$$\text{IKK 2.2} = (\text{Persentase TTA online} \times 50\%) + \left(\frac{\text{Persentase TTA yang telah dipasang}}{\text{perangkat digitalisasi Terminal} \times 50\%} \right)$$

Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A (SMART_{TN}):

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT
1	<i>Vending Machine</i>	20%
2	<i>passenger barrier gate</i>	20%
3	<i>vehicle barrier gate</i>	20%
4	CCTV	10%
5	<i>counting passenger</i>	10%
6	<i>information display</i>	20%

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Jalan

CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

DEFINISI	
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.	
SUMBER DATA	
• Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan • Balai Pengelola Transportasi Darat	
CARA MENGHITUNG	
$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$	
SATUAN	
Persentase (%)	
PENANGGUNG JAWAB	
Balai Pengelola Transportasi Darat	
CATATAN	

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

DEFINISI

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015.

SUMBER DATA

- Direktorat Lalu Lintas Jalan
- Balai Pengelola Transportasi Darat

CARA MENGHITUNG

$$IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat

CATATAN

Fokusnya pada ruas jalan yang telah menerapkan jalan yang berkeselamatan

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB.
Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.
SUMBER DATA
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (Data aplikasi Jembatan Timbang Online/JTO) - Balai Pengelola Transportasi Darat
CARA MENGHITUNG
$IKK\ 4.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

DEFINISI
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.
SUMBER DATA
• Direktorat Sarana Transportasi Jalan • BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat)
CARA MENGHITUNG
$IKK4.5 = \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ}$
SATUAN
Orang
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat
CATATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

DEFINISI
Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari: - Aspek Perencanaan; - Aspek Kepgawaian (SDM); - Aspek Keuangan; - Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum) Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance. Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin. Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran
SUMBER DATA
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat)
CARA MENGHITUNG

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		10%	
2	Perjanjian Kinerja		5%	
3	pengisian input e-planning		5%	
4	pengisian input e-performance		5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)		6%	
2	Kompetensi		10%	
3	Kinerja		8%	
4	Disiplin		1%	

C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	
SATUAN			
Nilai			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat			
CATATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

SUMBER DATA

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat)

CARA MENGHITUNG

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

- A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
- B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisiner;
- C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata – rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurang nya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor

***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

CATATAN

REVISI II RENCANA KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1.	SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90%
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan	%	90%
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
2.	SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
4.	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
5.	SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Bandung, 28 Oktober 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat



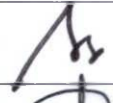
HANURA KELANA I, A.Md.LLAJ., S.Sos., S.H., M.M
NIP. 19670516 198903 1 012



REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat
Tahun 2024

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Gilang Adi Subagja, S.A.P	Penyusun Rencana dan Pelaporan	11 /10/2024	
2	Dikonsep	Dani Muhamad Yanuar	Penyusun Rencana dan Pelaporan	11 /10/2024	
3	Diperiksa	Danny Irawan, S.SiT	Kepala Subbagian Tata Usaha	18 /10/2024	
4	Disetujui	Danny Irawan, S.SiT	Kepala Subbagian Tata Usaha	18 /10/2024	
5	Disetujui	Agus Gunadi, S.Kom., M.Hum	Kepala Seksi Lalu lintas Jalan,Sungai,Danau Penyeberangan dan Pengawasan	21 /10/2024	
6	Disetujui	Didik Tri Margono, S.E., M.M.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,Sungai, Danau dan Penyeberangan	21 /10/2024	
7	Disetujui	Ade Supriadi,S.E., M.M.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	21 /10/2024	



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanura Kelana I, A.Md.LLAJ., S.Sos., S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 2 Desember 2024

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Jawa Barat



HANURA KELANA I, A.Md.LLAJ., S.Sos., S.H., M.M.
NIP. 19670516 198903 1 012

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	90%
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan	%	90%
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15
2.	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100%
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100%
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

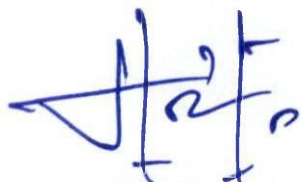
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan

Anggaran

1.	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	179.049.642.000
2.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	28.703.927.000
3.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	76.117.906.000
4.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	63.198.191.000
5.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	11.029.618.000
6.	Pogram Dukungan Manajemen	Rp.	50.814.111.000
7.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	6.987.638.000
8.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	43.826.473.000

Disetujui,
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Bandung, 2 Desember 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat



HANURA KELANA I, A.Md.LLAJ., S.Sos., S.H., M.M
NIP. 19670516 198903 1 012



REVISI II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KIRERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PERANGGUNG JAWAB			
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintihan angkutan jalan	%	90	051. Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	10%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	Rp	13.862.145.000	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintihan angkutan SDP	%	90	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	10%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	Rp	18.000.000.000	Seksi Sarana
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	002. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Operasional Terminal)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Rp	27.198.109.000	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	051. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Rp	3.352.060.000	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	051. Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A 052. Excellent Service Terminal Penumpang Tipe A	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	31.698.109.000	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	002. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Operasional Terminal)	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	27.198.109.000	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	051. Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	10%	15%	25%	25%	25%	75%	75%	80%	85%	85%	90%	100%	Rp	3.352.060.000	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	051. Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional 052. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan 053. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) 051. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10%	15%	20%	20%	20%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	90%	Rp	37.939.041.000	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	052. Operasional UPPKB	0%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	20%	21%	21%	26%	35%	Rp	10.799.016.000	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	051. Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	Rp	350.000.000	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	023. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupkai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	70	75	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	Rp	8.845.400.000	Sub Bagian TU
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	002.K. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 001. Gaji dan Tunjangan	70	75	80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	Rp	43.826.473.000	Sub Bagian TU

Bandung, 25 Oktober 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat

HANUKA KELANATAMA LLAJ, S.Sos., S.H., M.M.
NIP. 19670816 198903 1 012
KELAS II JAWA BARAT



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN JANUARI				REALISASI BULAN JANUARI		% CAPAIAN BULAN JANUARI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	10%	10%	13.862.145.000	0	10%	13.862.145.000	10%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	100%	100%	18.000.000.000	0%	15	18.000.000.000	15	0	-	-	Seksi LLJSDP
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIRAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	22.043.987.000	2,88%	10	22.043.986.012	10	2,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	3.069.100.000	8,44%	15	3.069.008.050	15	8,44%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	10%	10%	22.043.987.000	2,88%	10%	22.043.986.012	10%	2,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	0	1%	22.043.987.000	2,88%	0	22.043.986.012	10	2,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	3.069.100.000	8,44%	15	3.069.008.050	15	8,44%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	10%	11,11%	37.929.041.000	0	10%	37.929.041.000	0	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Dijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	0%	0%	10.562.343.000	2,19 %	0	10.562.343.114	0	2,19 %	Operasional sudah berjalan namun persentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
			IKK3.3	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100,00%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	70	82%	8.151.480.000	0,36 %	70	8.151.482.000	70	0,36 %	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Dijen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Personalia, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	70	82%	39.388.141.000	90,05%	70	39.388.141.061	70	90,05%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN FEBRUARI				REALISASI BULAN FEBRUARI		% CAPAIAN BULAN FEBRUARI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	10%	10%	13.862.145.000	0	10%	13.862.145.000	10%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
		IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	100%	100%	18.000.000.000	0%	15	18.000.000.000	15	0	-	-	Seksi LLJSDP
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIRAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANGJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	2.880.527.000	12,69%	10	2.880.526.608	10	12,69%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	424.872.000	12,67%	15	424.871.950	15	12,67%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	10%	10%	2.880.527.000	12,69%	10%	2.880.526.608	10%	12,69%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	0	1%	2.880.527.000	12,69%	0	2.880.526.608	10	12,69%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	424.872.000	12,67%	15	424.871.950	15	12,67%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	0%	0,00%	37.929.041.000	0	0%	37.929.041.000	0	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Diijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	5%	14%	895.483.000	8,29%	5%	895.483.491	0	8,29%	Operasional sudah berjalan namun persentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
		IKK3.3	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	300.000.000	0%	0	300.000.000	0	100,00%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	75	88%	8.151.480.000	10,71%	75	876.575.038	75	10,71%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Diijen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Diijen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Personalia, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	75	88%	8.404.433.000	19,21%	75	8.404.433.669	75	19,21%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN MARET				REALISASI BULAN MARET		% CAPAIAN BULAN MARET		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%								VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	25%	25%	13.862.145.000	0	25%	13.862.145.000	25%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
		IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	100%	100%	18.000.000.000	0%	15	18.000.000.000	15	0	-	-	Seksi LLJSDP
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKARUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	6.925.751.000	30,51%	10	6.925.759.921	10	30,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	908.004.500	27,09%	15	908.004.503	15	27,09%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	10%	10%	6.925.751.000	30,51%	10%	6.925.759.921	10%	30,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	0	1,00%	6.925.751.000	30,51%	0	6.925.759.921	10	30,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	908.004.500	27,09%	15	908.004.503	15	27,09%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	15%	16,67%	37.929.041.000	100%	15%	37.929.041.000	90	100%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	10%	29%	2.708.455.762	25,08%	10%	2.708.455.762	35	25,08%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100,00%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	2.650.722.400	32,40%	80	2.650.722.451	80	32,40%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	19.624.933.900	44,87%	80	19.624.933.930	80	44,87%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN APRIL				REALISASI BULAN APRIL		% CAPAIAN BULAN APRIL		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%				
1																			
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	40%	40%	100%	13.862.145.000	0	40%	13.862.145.000	40%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
		IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	90%	90%	100%	18.000.000.000	0%	90%	18.000.000.000	90%	0	-	-	Seksi LLJSDP
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIRAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANGJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	7.077.338.700	31,18%	10	7.077.338.641	10	31,18%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	916.658.400	27,35%	25	916.658.309	25	27,35%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10%	10%	100%	7.077.338.700	31,18%	10%	7.077.338.641	10%	31,18%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	7.077.338.700	31,18%	0	7.077.338.641	10	31,18%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	916.658.400	27,35%	25	916.658.309	25	27,35%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	20%	20%	100%	34.289.371.000	100%	20%	34.289.371.000	20	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
		IKK3.3	Persentase pelanggaran pada UPPKIB Diijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKIB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKIB	35%	10%	29%	2.780.706.000	25,75%	10%	2.780.705.585	10	25,75%	Operasional sudah berjalan namun persentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	2.686.232.500	32,84%	80	2.686.232.451	80	32,84%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
SK6	Meningkatnya Birokrasi Diijen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Diijen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	18.272.524.500	41,77%	80	18.272.524.411	80	41,77%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN MEI				REALISASI BULAN MEI		% CAPAIAN BULAN MEI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%								VOLUME	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	40%	40%	100%	13.862.145.000	0	40%	13.862.145.000	40%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	90%	90%	100%	3.564.595.000	19,80%	90%	3.564.595.200	90%	19,80%	-	-	Seksi LLJSDP
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	8.877.465.800	39,11%	10	8.877.465.771	10	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	1.130.155.000	33,72%	25	1.130.154.950	25	33,72%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10%	10%	100%	8.877.465.800	39,11%	10%	8.877.465.771	10%	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	8.877.465.800	39,11%	0	8.877.465.771	10	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	1.130.155.000	33,72%	25	1.130.154.950	25	33,72%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	20%	20%	100%	2.049.300.000	5,40%	20%	2.049.300.000	20	5,40%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	10%	29%	3.484.303.600	32,27%	10%	3.484.303.647	10	32,27%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	2.950.117.400	36,06%	80	2.950.117.395	80	36,06%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	21.714.692.900	49,64%	80	21.714.692.886	80	49,64%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDUKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN MEI				REALISASI BULAN MEI		% CAPAIAN BULAN MEI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%								VOLUME	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	40%	40%	100%	13.862.145.000	0	40%	13.862.145.000	40%	0	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	90%	90%	100%	3.564.595.000	19,80%	90%	3.564.595.200	90%	19,80%	-	-	Seksi LLJSDP
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	8.877.465.800	39,11%	10	8.877.465.771	10	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	1.130.155.000	33,72%	25	1.130.154.950	25	33,72%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10%	10%	100%	8.877.465.800	39,11%	10%	8.877.465.771	10%	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	8.877.465.800	39,11%	0	8.877.465.771	10	39,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	25	25	100%	1.130.155.000	33,72%	25	1.130.154.950	25	33,72%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	20%	20%	100%	2.049.300.000	5,40%	20%	2.049.300.000	20	5,40%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	10%	29%	3.484.303.600	32,27%	10%	3.484.303.647	10	32,27%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	0	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	2.950.117.400	36,06%	80	2.950.117.395	80	36,06%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	21.714.692.900	49,64%	80	21.714.692.886	80	49,64%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN JUNI				REALISASI BULAN JUNI		% CAPAIAN BULAN JUNI		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	25%	25%	13.576.240.800	97,94%	25%	13.576.240.798	25%	97,94%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	25%	25%	17.840.056.000	99,11%	50%	17.840.056.000	50%	99,11%	-	-	Seksi LLJSDP
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	11.463.796.200	50,51%	10	11.463.796.176	10	50,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	1.430.590.200	42,68%	15	1.430.590.204	15	42,68%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	75%	75%	11.463.796.200	50,51%	75%	11.463.796.176	75%	50,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100	75	75%	11.463.796.200	50,51%	75	11.463.796.176	75	50,51%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100	75	75%	1.430.590.200	42,68%	75	1.430.590.204	75	42,68%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	60%	67%	25.978.000.000	68,49%	60%	25.978.000.000	60	68,49%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	15%	43%	4.246.733.500	39,33%	15%	4.246.733.480	15	39,33%	Operasional sudah berjalan namun presentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100	0%	0	0	0%	0	300.000.000	0	100%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	3.613.704.800	44,17%	80	3.613.704.863	80	44,17%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	30.848.170.500	66,88%	80	30.848.170.543	80	66,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERILAKUAN MINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET OUTPUT				TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT		REALISASI ANGGARAN		% CAPAIAN ANGGARAN JKT		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN							
								VOLUME	%	VOLUME	%				VOLUME	VOLUME	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1	SK1	Memangkutnya keselamatan transportasi darat dan tercapainya keselamatan transportasi	IKK1.1	%	100	Perawatan pelaksanaan operasional angkutan jalan	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	60%	60%	13 576 240,996	97,94%	60%	13 862 145 000	60%	97,94%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan akan pencairan	Sekeloa Seceana		
						Perawatan pelaksanaan operasional angkutan SDP	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	60%	60%	17 840 056 000	99,11%	60%	17 840 056 000	60%	99,11%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan akan pencairan	Sekeloa LIJSDP		
						Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi	1.TTA BANJAR 2.TTA TASIK 3.TTA GARUT 4.TTA SUMEDANG 5.TTA CIKAMPEK 6.TTA CIBEBON 7.TTA KUNINGAN 8.TTA SUBANG 9.TTA SUKABUMI 10.TTA LEUWIPANJANG Perawatan	Terminal Tipe-A dioperasikan	10	10	100%	11 463,796 176	57,62%	10	11 463,796 176	10	57,62%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan akan pencairan	Sekeloa Praseana		
						Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Pada Pelabuhan Penyelenggaraan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyelenggaraan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	15	15	100%	1 430 590 204	48,27%	15	1 430 590 204	15	48,27%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan akan pencairan	Sekeloa Praseana		
2	SK2	Memangkutnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	%	100	Perawatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	Pada Terminal Tipe A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dioperasikan	100%	75%	75%	11 463,796 176	57,62%	75%	11 463,796 176	75%	57,62%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan akan pencairan	Sekeloa Praseana		
						Perawatan pelayanan SMART terminal tipe A	Pada Terminal Tipe A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dioperasikan	100%	75%	75%	11 463,796 176	57,62%	75%	11 463,796 176	75%	57,62%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan akan pencairan	Sekeloa Praseana		
						Perawatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	Pada Pelabuhan Penyelenggaraan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyelenggaraan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	100%	75%	75%	1 430 590 204	48,27%	75%	1 430 590 204	75%	48,27%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan akan pencairan	Sekeloa Praseana		
3	SK4	Memangkutnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	%	90%	Perawatan pelayanan jalan yang telah terpasang terdapat kondisi ideal	Tipenew g di Daerah Jawa Barat	Pelengkapan Jalan	90%	60%	67%	24 358 182 556	54,10%	60%	24 358 182 556	60%	54,10%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan akan pencairan	Sekeloa LIJSDP		
						Perawatan pelayanan pada UPPKB Dagen Perhubungan Darat	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelengkapan pada UPPKB	35%	15%	43%	4 246,933 480	44,55%	15%	4 246,933 480	15%	44,55%	Operasional sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Operasional akan dilanjutkan	Sekeloa LIJSDP		
						Jumlah masyarakat yang terdampak tentang keselamatan transportasi jalan	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	0%	0	0	0%	0	350 000 000	0	0%	Kegiatan akan di lakukan akan Pada Bulan September	Akan di Lakukan akan di lakukan	Sekeloa LIJSDP		
4	SK5	Memangkutnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pelajar Transportasi Darat	IKK5.1	Nilai	85	Perawatan dan Baku sar serta Pelengkapan Tipe A	Perawatan dan Baku sar serta Pelengkapan Tipe A	85	80	94%	3 613,070 4 863	52,92%	80	3 613,070 4 863	80	52,92%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan akan pencairan	TU			
5	SK6	Memangkutnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pelajar Transportasi Darat	IKK6.1	Nilai	85	Pengelolaan Kualitas Penyelenggaraan pelayanan	Layanan Pelayanan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Kualitas Penyelenggaraan pelayanan, Kewaspadaan, BMM, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	30 848 170 500	66,88%	80	18 272 524 411	80	66,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan akan pencairan	TU			

Bandung, 2 Agustus 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat



MUHAMMAD FERMI S.T. M.M.T.
Pangkat Tk. I (III/d)
NP. 19800724 200904 1 001



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDUKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN AGUSTUS				REALISASI BULAN AGUSTUS		% CAPAIAN BULAN AGUSTUS		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	70%	70%	10.309.779.433	74.37%	70%	10.309.779.433	70%	74.37%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
			IKK1.2	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	70%	70%	16.188.081.600	89.93%	70%	16.188.081.600	70%	89.93%	-	-	Seksi LLJSDP
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASIK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIREBON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKABUMI 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	21.173.146.480	69.31%	10	21.173.146.480	10	69.31%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	2.037.855.014	60,79%	15	2.037.855.014	15	60,79%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	80%	80%	21.173.146.480	69.31%	80%	21.173.146.480	80%	69.31%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	80%	80%	21.173.146.480	69.31%	80%	21.173.146.480	80%	69.31%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	80%	80%	2.037.855.014	60,79%	80%	2.037.855.014	80%	60,79%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	65%	72%	26.396.796.248	69.60%	65%	26.396.796.248	65%	69.60%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran belum dilaksanakan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	20%	57%	5.949.211.611	55,09%	20%	5.949.211.611	20%	55,09%	Operasional sudah berjalan namun persentase pelanggaran minim	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	0%	0	0	0%	0	350.000.000	0	0%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	-	Seksi LLJSDP
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	2.686.232.500	32,84%	80	2.686.232.451	80	32,84%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	18.272.524.500	41,77%	80	18.272.524.411	80	41,77%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih sedikit	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU

Bandung, 4 September 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat


Penata TKI (III/d)
NIP. 19800724 200604 1 001



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan September				Realisasi Bulan September				% Capaian Bulan September		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output		Realisasi Anggaran		Capaian Output					Capaian Anggaran	
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperluan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	75%	75%	4.209.081.636	30,36%	75%	4.209.081.636	75%	30,36%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana			
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan keperluan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	75%	75%	8.756.573.421	48,65%	75%	8.756.573.421	75%	48,65%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP			
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal bus yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASEK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIBERON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKARAME 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	15.389.780.587	67,80%	10	15.389.780.587	10	67,80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana			
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Damau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	2.200.795.979	65,66%	15	2.200.795.979	15	65,66%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana			
		2	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	15.389.780.587	67,80%	85%	15.389.780.587	85%	67,80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana	
IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A			%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	15.389.780.587	67,80%	85%	15.389.780.587	85%	67,80%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana			
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP			%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Damau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	85%	85%	2.200.795.979	65,66%	85%	2.200.795.979	85%	65,66%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana			
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat			IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	70%	78%	26.544.336.312	69,98%	70%	26.544.336.312	70%	69,98%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP	
				IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Diagen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	21%	60%	6.367.091.967	58,96%	21%	6.367.091.967	21%	58,96%	Operasional sudah berjalan namun persentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP	
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	100%	100%	350.000.000	100%	100%	350.000.000	100%	100%	Kegiatan akan dilaksanakan Pada Bulan Oktober	Akan dilaksanakan Bulan September	Seksi LLJSDP			
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tugastek Direktorat Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	80	94%	5.745.729.418	64,96%	80	5.745.729.418	80	64,96%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU			
5	SK6 Meningkatnya Birokrasi Diagen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Diagen Perhubungan Darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	85	80	94%	38.481.413.667	66,88%	80	38.481.413.667	80	66,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU			

Bandung, 2 Oktober 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat

Husnu Kilaia I. A Md LLAJ. S.Sos. S.H. M.M.
Pemuka (III/d)
NIP. 19670516 198903 1 012



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN OKTOBER				REALISASI BULAN OKTOBER		% CAPAIAN BULAN OKTOBER		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT VOLUME	REALISASI ANGGARAN VOLUME	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatkan produktivitas transportasi darat dan keterpulan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperluan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100%	80%	80%	6.393.448.954	46.12%	80%	6.393.448.954	80%	46.12%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Sarana
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan keperluan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Perintis (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	80%	80%	10.959.090.421	60.88%	80%	10.959.090.421	80%	60.88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal bus yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA.BANJAR 2.TTA.TASEK 3.TTA.GARUT 4.TTA.SUMEDANG 5.TTA.CIKAMPEK 6.TTA.CIBERON 7.TTA.KUNINGAN 8.TTA.SUBANG 9.TTA.SUKARAME 10.TTA.LEUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	24.686.220.363	77.61%	10	24.686.220.363	10	77.61%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Damau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	2.696.316.309	80,44%	15	2.696.316.309	15	80,44%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	24.686.220.363	77,61%	85%	24.686.220.363	85%	77,61%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
2	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	24.686.220.363	77,61%	85%	24.686.220.363	85%	77,61%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Damau di Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	85%	85%	2.696.316.309	80,44%	85%	2.696.316.309	85%	80,44%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi Prasarana
		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Perlengkapan Jalan	90%	70%	78%	34.527.556.312	91,03%	70%	34.527.556.312	70%	91,03%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Seksi LLJSDP
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Diagen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pelanggaran pada UPPKB	35%	21%	60%	8.075.772.415	74,78%	21%	8.075.772.415	21%	74,78%	Operasional sudah berjalan namun persentase pelanggaran masih	Operasional akan ditingkatkan	Seksi LLJSDP
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	100%	100%	350.000.000	100%	100%	350.000.000	100%	100%	Kegiatan akan dilaksanakan Pada Bulan Oktober	Akan dilaksanakan Bulan September	Seksi LLJSDP
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tugaski Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	85	100%	7.292.282.619	78,24%	85	7.292.282.619	85	78,24%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
		IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Diagen Perhubungan Darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transmigrasi Darat	85	85	100%	44.948.819.877	97,73%	85	44.948.819.877	85	97,73%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	SK6 Meningkatkan Birokrasi Diagen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Diagen Perhubungan Darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transmigrasi Darat	85	85	100%	44.948.819.877	97,73%	85	44.948.819.877	85	97,73%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU

Bandung, 4 November 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat

Husnu Kelana I. A Md LLAJ, S.Sos., S.H., M.M.
Pemuka (III/d)
NIP. 19670516 198903 1 012



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERAKSIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA SALAH PERANGKAT TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SARAFAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN November				REALISASI BULAN November		% CAPAIAN BULAN November		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PEHANGGUNG JAWAB
								TARGET OUTPUT	TARGET ANGGARAN	REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	BK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpakaian antar moda transportasi	BK1.1 Persentase pelaksanaan keprifektisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Prioritas (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Prioritas	100%	85%	85%	7.425.747.389	46,12%	85%	7.425.747.389	85%	76,29%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Sarana
		BK1.5 Persentase pelaksanaan keprifektisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Prioritas (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	100%	85%	85%	13.367.431.919	60,88%	85%	13.367.431.919	85%	82,86%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai LJJSDP
		BK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA BANJAR 2.TTA TASIK 3.TTA GARUT 4.TTA SUMEDANG 5.TTA CIKAMPEK 6.TTA CIBERONG 7.TTA KUNINGAN 8.TTA SUBANG 9.TTA SUKABUMI 10.TTA LEBUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	25.098.544.972	77,61%	10	25.098.544.972	10	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
		BK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyelenggaraan Sungai Danau & Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyelenggaraan Beroperasi	15	15	100%	3.352.202.911	80,44%	15	3.352.202.911	15	95,63%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
2	BK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	BK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	90%	90%	25.098.544.972	77,61%	90%	25.098.544.972	90%	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
		BK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	25.098.544.972	77,61%	90%	25.098.544.972	90%	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
		BK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyelenggaraan Sungai Danau & Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyelenggaraan Beroperasi	100%	90%	90%	3.352.202.911	80,44%	90%	3.352.202.911	90%	95,63%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
3	BK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	BK4.1 Persentase pengalangan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Pengalangan Jalan	90%	75%	83%	36.953.659.312	91,10%	75%	36.953.659.312	75%	91,10%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai LJJSDP
		BK4.2 Persentase pengalangan pada UPPKB Diijen Perhubungan Darat	%	35%	Pada UPPKB Aktif di Jawa Barat	Pengalangan pada UPPKB	35%	26%	74%	9.561.897.364	74,78%	26%	9.561.897.364	26%	88,18%	Operasional sudah berjalan namun persentase pengalangan masih	Operasional akan ditingkatkan	Sekai LJJSDP
		BK4.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	100%	100%	350.000.000	100%	100%	350.000.000	100%	100%	Kegiatan akan di laksanakan Pada Bulan Oktober	Akan di Laksanakan Bulan September	Sekai LJJSDP
4	BK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	BK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Topikal Direktorat Jendral Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	85	100%	8.224.837.791	77,32%	85	8.224.837.791	85	77,32%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	BK6 Meningkatkan Efisiensi Dijen Perhubungan Darat	BK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	85	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, HRM, dan Umum Transportasi Darat	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, HRM, dan Umum Transportasi Darat	85	85	100%	49.105.691.286	95,00%	85	49.105.691.286	85	95,00%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU

Bandung, 4 Desember 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat

Husnu Mulya L A W I L A J , S So , S H , N M .
Pembinu III/3
NIP. 19670516 198903 1 012



MONITORING ATAS BENCANA AKSI ATAS PERAKSIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA SALAH PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

NO	SARANAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET BULAN DESEMBER				REALISASI BULAN DESEMBER		% CAPAIAN BULAN DESEMBER		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	VOLUME	(13)	(14)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	BK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	BK1.1	Persentase pelaksanaan keprifektisan angkutan jalan	%	100	Angkutan Jalan Prioritas (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan Jalan Prioritas	90%	90%	100%	9.733.268.000	100,00%	90%	9.733.268.000	90%	100%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Sarana
		BK1.5	Persentase pelaksanaan keprifektisan angkutan SDP	Lokasi	100	Angkutan SDP Prioritas (Prioritas Nasional)	Layanan Angkutan SDP	90%	90%	100%	16.132.728.000	100%	90%	16.132.728.000	90%	1	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai LJJSDP
		BK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	10	1.TTA BANJAR 2.TTA TASIK 3.TTA GARUT 4.TTA SUMEDANG 5.TTA CIAMPEK 6.TTA CIBERONG 7.TTA KUNINGAS 8.TTA SUBANG 9.TTA SUKAREM 10.TTA LEBUWIPANJANG Perkantoran	Terminal Tipe-A dikelola	10	10	100%	29.458.610.000	98,74%	10	29.458.610.000	10	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
		BK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	15	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau & Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	15	15	100%	3.505.207.000	99,99%	15	3.505.207.000	15	95,63%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
		BK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	100%	100%	29.458.610.000	98,74%	100%	29.458.610.000	100%	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
2	BK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	BK2.2	Persentase pencapaian BMART terminal tipe-A	%	100	Pada Terminal Tipe-A Jawa Barat	Terminal Tipe-A dikelola	100%	85%	85%	29.458.610.000	98,74%	100%	29.458.610.000	100%	85,20%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
		BK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pada Pelabuhan Penyeberangan Sungai Danau & Wilayah Jawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	100%	100%	100%	3.505.207.000	99,99%	100%	3.505.207.000	100%	95,63%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai Prasarana
		BK3.1	Persentase peringkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90%	Terpasang di Daerah Jawa Barat	Peringkapan Jalan	90%	90%	100%	40.564.041.000	99,99%	90%	40.564.041.000	90%	99,99%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	Sekai LJJSDP
		BK3.2	Persentase pelayanan pada UPPKSD (Dipen Perhubungan Darat)	%	35%	Pada UPPKSD Aktif di Jawa Barat	Pelayanan pada UPPKSD	35%	35%	100%	10.844.049.000	99,98%	35%	10.844.049.000	35%	88,18%	Operasional sudah berjalan namun persentase pelayanan masih	Operasional akan ditingkatkan	Sekai LJJSDP
		BK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	Kegiatan Promosi dan Sosialisasi	100%	100%	100%	350.000.000	100%	100%	350.000.000	100%	100%	Kegiatan akan dilaksanakan Pada Bulan Oktober	Akan dilaksanakan Bulan September	Sekai LJJSDP
3	BK3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan teknis transportasi darat	BK3.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Topikal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	85	100%	10.637.426.000	99,99%	85	10.637.426.000	85	99,99%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
4	BK6 Meningkatkan Efisiensi Biaya Perhubungan Darat	BK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Pelayanan Dipro Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkaroran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengukuran Pemantauan, Keanggen, RMO, dan Umum Transportasi Darat	85	85	100%	50.114.111.000	99,88%	85	49.105.691.284	85	99,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU
5	BK6 Meningkatkan Efisiensi Biaya Perhubungan Darat	BK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Pelayanan Dipro Perhubungan darat	Nilai	85	Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkaroran	Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal serta Pengukuran Pemantauan, Keanggen, RMO, dan Umum Transportasi Darat	85	85	100%	50.114.111.000	99,88%	85	49.105.691.284	85	99,88%	Kegiatan sudah berjalan namun pencairan anggaran masih Berjalan	Akan segera dilaksanakan pencairan	TU

Bandung, 5 Desember 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jawa Barat

Hendra Salsana LAMALLAH, S.Sos, S.H., M.M.
Pencapaian 100%
NIP. 19670516 198903 1 012



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT, NO.8
JAKARTA, 10110

Telp. (021) 3506138,
3506129, 3506145
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862178
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP – DRJD 8613 TAHUN 2022

TENTANG

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Perintis Angkutan Jalan, telah diatur mengenai penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1605);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 630 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Berupa Bantuan Biaya Operasional Angkutan Jalan Perintis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS TAHUN 2023.
- PERTAMA : Menetapkan jaringan trayek angkutan jalan perintis Tahun 2023 di 32 (tiga puluh dua) Provinsi di Indonesia dengan jumlah trayek sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) trayek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pada jaringan trayek angkutan jalan perintis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan subsidi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 630 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Berupa Bantuan Biaya Operasional Angkutan Jalan Perintis.

- KETIGA : Dalam hal jaringan trayek angkutan jalan perintis sudah berkembang menjadi jaringan trayek angkutan jalan yang dapat dikomersilkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap jaringan trayek angkutan jalan perintis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Direktur yang bertanggung jawab di bidang angkutan jalan dan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat membentuk Tim untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan kelayakan jaringan trayek angkutan jalan perintis.
- KELIMA : Direktur yang bertanggung jawab di bidang angkutan jalan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

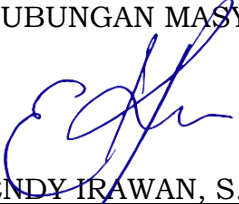
Ttd.

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai trayek perintis yang ditetapkan;
6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT



ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19820414 200502 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR KP – DRJD 8613 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN
JALAN PERINTIS TAHUN 2023

**JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS
TAHUN 2023**

NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
1	2	3		5
1	ACEH	1	Meulaboh - Alue Peunyaring	35
		2	Kota Kuala Simpang - Kota Selamat	78
		3	Sinabang - Sibigo	188
		4	Sinabang - Alafan	278
		5	Simpang Empat Kota Fajar - Mangamat	50
		6	Kuala Simpang - Tenggulun	86
		7	Gunung Meriah - Singkil	45
2	SUMATERA UTARA	8	Pematang Raya - Nagari Dolok	26
		9	Pematang Raya - Raya Bosi	23
		10	Pematang Raya - Bah Bolon	32
		11	Besitang - Tani Jaya - Pangkalan Berandan	36,5
		12	Sihosar (Merek) - Kabanjahe	25
		13	Pantai Buaya - Pangkalan Berandan	30
		14	Gunung Sitoli - Teluk Dalam	120
3	SUMATERA BARAT	15	Pulau Punjung - Sei Rumbai - Sitiung III	41
		16	Pulau Pujung - Sikabau - Simp.3 Koto Baru - Ampalu	40
		17	Padang Aro – Uluh Suliti	62
		18	Tuapejat - Sioban (Kab. Kepulauan Mentawai)	45
		19	Pariaman - Urek Kaji - P.Kambar - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	24

NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
		20	Poltekpel Sumbar - Pasar Usang	31
		21	- Lubuk Alung - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman Terminal Simpang IV – Bateh Samuik	96
4	RIAU	22	Bangkinang - Koto Kampar Hulu	65
		23	Minas - Tualang - Gasib - Siak - Bunga Raya - Sungai Apit – Mengkapan	168
5	KEPULAUAN RIAU	24	Sembulang - Jodoh (Kota Batam)	60
		25	Ranai - Cemaga - Selat Lampa (Natuna)	80
		26	Daek Lingga - Pancur (Kab. Lingga)	50
		27	Dabo - Tinjul (Kab. Lingga)	40
		28	Daek Lingga - Kudung (Kab. Lingga)	46
		29	Ranai - Batubi - Kelarik (Kab. Natuna)	62
6	JAMBI	30	Desa Batu Kerbau - Terminal Tipe A Muara Bungo	75
		31	Desa Mekar Jaya - Terminal Muara Bulian - Terminal Alam Barajo Jambi	85
		32	Desa Sari Mulya - Terminal Tipe A Muara Bungo	97
		33	Desa Suo - Suo - Terminal Tipe C Rimbo Bujang	82
		34	Desa Bangun Seranten - Terminal Bungo	90
		35	Desa Sentano - Terminal Tipa C Rimbo Bujang	65
		36	Senyerang - Teluk Nilau - Kuala Tungkal	60
		37	Desa Tanah Tumbuh - Simpang Niam - Terminal Muara Bulian	120
7	SUMATERA SELATAN	38	Terminal Simpang Periuk - SP. 9 Cecar	80
		39	Terminal Simpang Periuk - Muara Rupit - Simpang Nibung	117

NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
8	BENGKULU	40	Banjarsari - Kayapuh (Pulau Enggano)	45
		41	Bengkulu - Kerkap - Agramakmur - Muara Aman	140
		42	Muara Aman Curup - Simpang Nangka	80
9	BANGKA BELITUNG	43	Pangkal Pinang - Tanjung Pura	70
		44	Tanjung Ruu - Tanjung Pandan - Manggar (Via Renggiang)	121
		45	Pangkal Pinang - Pusuk	73
		46	Pangkal Pinang - Keretak - Koba	85
10	LAMPUNG	47	Pringsewu - Sendang Agung	27
		48	Daya Murni - SP. Propau	42
		49	Rajabasa - Jabung	85
		50	Bandar Jaya - Sulusuban - Padang Ratu - Kalirejo	62
		51	Margomulyo - Karanganyar - Natar (Simpang Tiga RS Medika Natar)	30
		52	Liwa - Kebon Tebu	91
		53	PS Panarangan Jaya - Negara Batin	52
11	BANTEN	54	Serang - Rangkasbitung - Ketapang	130
		55	Cigemblong - Serang	116
		56	Serang - Ciboleger (Baduy)	104
		57	Serang - Cirinteun	108
		58	Serang - Carita	93
		59	Serang - Munjul	132
		60	Serang - Gadok	160
12	JAWA BARAT a. BANDUNG	61	Surade - Jampang Kulon - Kali Bunder - Sagaranten	65
		62	Pangandaran - Cipatujah - Pameungpeuk - Sindangbarang	248
		63	Sindang Barang - Tegal Buleud	90
		64	Tegal Buleud - Sagaranten	72
		65	Sagaranten - Kiara Dua - Pelabuhan Ratu	76

NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
	b. BOGOR	66	Terminal Jasinga - Terminal Parung Panjang	33
		67	Leuwiliyang - Banyu Resmi	18,2
		68	Terminal Cikidang - Terminal Leuwiliang	66
		69	Leuwiliyang - Taman Sari	30
		70	Surade - Bubulak (Bogor)	154
13	JAWA TENGAH	71	Teluk Penyu - Kemit - Nusa Wungu	55
14	JAWA TIMUR			
	a. PONOROGO	72	Terminal Selo Aji (Ponorogo) - Terminal Sarangan (Magetan)	58
		73	Ponorogo - Pohijo - Terminal Plaosan	64
		74	Ponorogo - Ngebel	30
		75	Terminal Purboyo (Kota Madiun) - Monumen Kresek - Nongko Ijo - Pasar Gosong Baru	47,8
		76	Ponorogo - Jeruk (Pacitan)	53
		77	Ponorogo - Tulungagung	74
		78	Caruban (Kab. Madiun) - Terminal Kertonegoro (Kab. Ngawi)	67
	b. SURABAYA	79	Mojoagung - Wonosalam	25
		80	Terminal Ploso - Desa Marmoyo	20
			Pelabuhan Penyeberangan Bawean (Rute Timur) - Alun Alun Sangkapura - Shelter Pamona - Shelter Ponpes Nurul Huda - Bandara Harun Thohir - Shelter Teluk Jatidawang - Pelabuhan Penyeberangan Bawean	61
	c. BANYUWANGI	82	Terminal Tawang Alun - Papuma	37
		83	Jajag - Sarongan	46
		84	Terminal Ambulu - Terminal Ajung - Terminal Tawang Alun	71
		85	Terminal Ambulu - Pasar Candipuro	80
		86	Pasar Muncar - Pantai Pancer	53,9

NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
		87	(Kab. Banyuwangi) Tegalsari - Pasar Genteng - Stasiun Kalisetail	33
15	BALI	88	Terminal Loca Crana - Tejakula	59
		89	Terminal Loca Crana - Dermaga Kadisan - Songan	36,7
		90	Terunyan - Tenten	17
		91	Terunyan - Bayung Gede	18
		92	Catur - Terminal Loca Crana	46
		93	Batununggul - Batumadeg	25
		94	Suana - PED	21
		95	Junggut Batu - Lembongan	13
		96	Terminal Panarukan - Desa Dause	45
16	NUSA TENGGARA BARAT	97	Terminal Mandalika - Moyo Hilir	120
		98	Terminal Mandalika - Sumbawa Besar - Lantung	123
		99	Terminal Mandalika - Sumbawa - Matta	180
		100	Terminal Mandalika - Praya - Taliwang - Talonang	105
		101	Terminal Mandalika - Leweng	100
17	NUSA TENGGARA TIMUR			
	a. ENDE	102	Ende - Riung	125
		103	Ende - Nggela	95
		104	Ende - Wologai - Watunggere Marilonga	66
		105	Ende - Wologai - Boa Feo	48
		106	Ende - Marungela	185
		107	Terminal Wiri - Riang - Kerako	45
		108	Labuan Bajo - Werang	42
		109	Ende - Pamo - Kelimutu	72
	b. KUPANG	110	Kupang - Naimata	20
		111	Kupang - Lelogama	178
		112	Kupang - Raknamo - Fatumnasi	146.35
		113	Kupang - Kuanfatu	138
		114	Kupang - Ayutupas - Besikama	232
		115	Terminal Noelbaki - Merubelon	130

NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
		116	Kupang - Oenlasi	153
		117	Kupang - Tinis	93
		118	Kupang - Oekam - Besnam	182
		119	Kupang - Soe - Kapan - Eban - Oepoli	230
		120	Kupang - Oemoro	80
		121	Baa - Landuleko (Mulut Seribu)	60
		122	Baa - Inaoe	27.1
	c. WAINGAPU	123	Waingapu - Kataka	64
		124	Waingapu - Tanarighu - Malata	188
		125	Waingapu - Tanarara - Kenanggar	119
		126	Waingapu - Nggongi	149
		127	Waingapu - Maubokol	60
		128	Waingapu - Tabundung	190
		129	Waingapu - Manggili - Tama	115
	d. KEFAMENANU	130	Kefamenanu - Noelelo -Oepoli - Napan	211
		131	Kefamenanu - Napan - Wini - Ponu	155
		132	Kefamenanu - Noelmuti - Naob	36
		133	Kefamenanu - Moresu	50
		134	Kefamenanu - Inbate	54
		135	Kefamenanu - Oekolo	103
		136	Kefamenanu - Sipi - Bokis	54
		137	Kefamenanu - Oepoli	170
18	KALIMANTAN BARAT	138	Bengkayang - Jagoibabang	106
		139	Badau - Nanga kantuk - Puringkencana	49
		140	Sintang - Nangamau - Nanga tebidah	112
		141	Ketapang - Simpang Siduk - Sukadana - Teluk Batang	120
		142	Terminal Sungai Durian Sintang - Tempunak	90
		143	Putusibau - Jongkong - Selimbau	175
		144	Sambas - Aruk	89
19	KALIMANTAN TENGAH	145	Sampit - Samuda	40

NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
		146	Buntok - Tabak Kanilan	45
		147	Muara Teweh - Lampeong	123
		148	P. Bun - Keraya - Sebuai Barat	74
		149	P. Bun - Pangkut	93
		150	Sampit - Parenggean	102
		151	Sukamara - Nanga Bulik	109
		152	Sukamara - Jelai	98
		153	Nanga Bulik - Kudangan	110
		154	Nanga Bulik - Bukit Jaya	48
20	KALIMANTAN SELATAN	155	Terminal Pelabuhan - Pantai Takisung - Tabanio	37
		156	Terminal Gambut Barakat - Loksado	152
		157	Terminal Paihari - Jorong	36
		158	Terminal Gambut Barakat - Terminal Marabahan	66
		159	Terminal Gambut Barakat - Batakan	39
21	KALIMANTAN TIMUR	160	Samarinda - Kembang Janggut	235
		161	Samarinda - Muara Muntai	153
		162	Sangatta - Pengadan	179
		163	Samarinda - Bantian Besar	354
		164	Sangatta - Maloy	122
		165	Samarinda - Jonggon	115
		165	Tanjung Redep - Tanjung Batu (Derawan)	144
22	KALIMANTAN UTARA	166	Tanjung Selor - Tideng Pale	160
		167	Tanjung Selor - Berau	101
		168	KTT - Seputuk - Malinau Sebatik (Pelabuhan Bambangan)	111
		169	- Dermaga Sei Nyamuk - Binalawan	105
		170	Malinau - Mensalong - Salang - Sei Ular	250
23	SULAWESI UTARA	171	Manado - Ratatotok - Molobog	165
		172	Paaldua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko	155
		173	Paaldua - Tondano - Kema -	150

NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
		174	Tangkoko Malalayang - Bonawang - Doloduo - Molibagu - Dumangin -Posilagon	357
		175	Melonguane - Beo - Esang - Gemeh	105
		176	Tangkoko - Mahembang - Jikoblanga	207
		177	Melonguane - Bowongbaru - Rainis - Beo	54
		178	Melonguane - Beo Rainis - Gemeh	90
		179	Malalayang - Tababo -Bantenan	100
		180	Malalayang - Lobu - Kalait	90
		181	Ondong - Peling - Tanaki - Bandara Taman Bung Karno	19,3
24	SULAWESI TENGAH	182	Poso - Bada	130
		183	Lawangke - Tangopa	220
		184	Biromaru - Poso	164
		185	Poso - Pendolo	106
		186	Palu - Kotaraya	263
		187	Toli Toli - Bangkir	133
25	SULAWESI TENGGERA	188	Kendari - Ereke	270
		189	Kendari - Tondasi	145
		190	Kendari - Pinanggo	150
		191	Bau-Bau - Kamaru	100
		192	Kendari - Abuki	120
		193	Tondasi - Bau-bau Via Waara	150
		194	Kendari - Bungku	350
26	GORONTALO	195	Gorontalo - Papualangi	205
		196	Gorontalo - Malango	251
		197	Gorontalo - Pelabuhan Anggrek	75
		198	Gorontalo - Buol	317
		199	Gorontalo - Pinolosian	197
		200	Gorontalo - Saritani	114
		201	Gorontalo - Bakti - Batu Layar	44
		202	Gorontalo - Bilato	80
27	SULAWESI BARAT	203	Terminal Tipalayo - Bambaira	513

NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
		204	Terminal Majene - Aralle	165
		205	Terminal Majene - Pamboang - Baruga	32
		206	Mamuju - Tasiu - Salubatu - Keppe	120
		207	Mamuju - Martajaya	296
		208	Batu Parigi - Mamuju - Lambanan	278,4
28	SULAWESI SELATAN	209	Makassar – Rongkong	77
		210	Masamba – Malangke – Baebunta – Palopo – Belopa	216
		211	Mangkutana – Tarengge – Malili – Danau Matano	101
		212	Pelabuhan Pamatata - Terminal Benteng	44
		213	Pool DAMRI Cab. Makassar - Tondong (Via Malino Sinjai)	173
		214	Ujung Lero Pinrang - Terminal Lumpue – Pelabuhan Garongkong - Satasiun Kereta Api Pekkae	95,2
		215	Bonebone – Tarengge – Malili – Danau Tuwoti	168
		216	Pool DAMRI Cab. Makassar (Pasar Sentral Daya) - Stasiun Marros (Via Moncongloe)	40
29	MALUKU	217	Ambon - Masiwang - Totok Tolu	593
		218	Ambon - Alune	215
		219	Ambon - Warasiwa (Maluku Tengah)	250
		220	Ambon - Laimu	330
		221	Ambon - Saka - Pasanea	215
		222	Ambon - Namto	387
		223	Namlea - Namrole	136
		224	Namlea - Masarete	94
		225	Namlea - Teluk Bara	134
		226	Namlea - Lala	10
		227	Namlea - Savana Jaya	25
		228	Langgur - Sathen - Danar - Madwaer - Tetoat	80
		239	Saumlaki - Batu Putih	51
		230	Saumlaki - Latdalam	38

NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
		231	Saumlaki - Larat	145
		232	Saumlaki - Arma - Watmuri	112
		233	Saumlaki - Marantutul - Wermatang	54
30	MALUKU UTARA	234	Malifut - Kao - Toliwang	70
		235	Tobelo - Galela - Saluta	150
		236	Tobelo - Loleba	229
		237	Pasar Fogi - Pelabuhan Ferry Sanana - Pasar Fogi	16
		238	Weda - Saketa	121,6
		239	Sofifi - Jalan KM 40 - Kantor Gubernur - Sofifi	10,3
		240	Tobelo - Trans Suka Maju (Trayek Baru)	35
		241	Wayabula - Daruba - Bere bere - Sopi	176
		242	Weda - Patani	12
		243	Pelabuhan Penyeberangan RUM - Terminal Sarimalaha	19
		244	Bibinoi - Babang - Wayaua	50
		245	Belang Belang - Labuha - Kubung	30
		246	Terminal Trans Goal - Terminal Jailoli - Desa Susupu	44
		247	Iga - Subain	67
		248	Terminal Fogi - Manaf	32
31	PAPUA			
	a. JAYAPURA	249	Jayapura - Senggi	153
		250	Jayapura - Skouw	70
		251	Jayapura - Taja	155
		252	Jayapura - Demta	118
		253	Jayapura - Yetti	94
	b. NABIRE	254	Nabire - Legare SP IV	76
		255	Nabire - Kaladiri Dalam	32
		256	Nabire - Toppo	45
		257	Nabire - Sima	85
		258	Nabire - Makimi	55
		259	Nabire - Yarosatu	50
		260	Nabire - Paniai	263
		261	Nabire - Kwatisore	155
	c. BIAK	262	Biak - Wardo/Kanaan	48

NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
		263	Biak - Korem - Rumbin	48
		264	Biak - Makmakerbo	50
		265	Biak - Sauri	46
		266	Biak - Wauna	62
		267	Numfor Barat - Numfor Timur	55
		268	Biak - Sorendiweri	94
		269	Biak - Pamdi	134
		270	Sorendiweri - Korido	28
		271	Sorendiweri - Kiamdori	38
		272	Sorendiweri - Doubo - Duber	20
	d. SERUI	273	Serui - Ariepe - Kamanap	50
		274	Serui - Wadapi	51
		275	Serui - Mariarotu	56
		276	Serui - Randawaya	70
		277	Serui - Kairawi	70
		278	Serui - Sarder	70
		279	Serui - Kanawa	46,86
		280	Serui - Papuma	90
		281	Urei Faisei - Waren	10
		282	Urei Faisei - SP 6	8
		283	Urei Faisei - Botoa	34
	e. MERAUKE	284	Terminal Kuprik - Jagebob	160
		285	Merauke - Sota	108
		286	Merauke - Muting	250
		287	Merauke - Kurik 5	160
		288	Terminal Merauke - Erambo, Toray	160
		289	Merauke - Ulilin	250
	f. TIMIKA	290	Timika - Mioko	55
		291	Timika - Pigapu	53
		292	Timika - Kalikamora	80
		293	Timika - Iwaka	35
		294	Timika - SP VI	35
		295	Timika - SP VII	35
		296	Timika - SP XIII	31
		297	Timika - SP V	22
		298	Timika - SP IX	20
	g. SARMI	299	Sarmi - Sewan - wafo	35

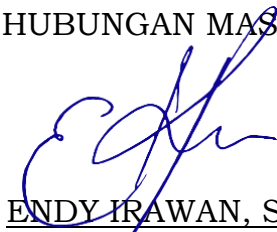
NO	PROVINSI	TRAYEK DILAYANI	RENCANA TRAYEK 2023	JARAK (Km)
		300	Sarmi - Arbais	70
		301	Sarmi - Podena	90
		302	Sarmi - Taronta	100
		303	Sarmi - Purtin KM 5	56
32	PAPUA BARAT			
	a. SORONG	304	Sorong - Seget	100
		305	Sorong - Klasari	70
		306	Sorong - Arar	26
		307	Sorong - Batu Payung - Klawak	112
		308	Sorong - Saoka	23
		309	Sorong - Ayamaru - Yukase	168
		310	Sorong - Kambuaya - Kambufaten	205
		311	Inam - Kebar - Mia	66
	b. SORONG SELATAN	312	Terminabuan - Seremuk	60
		313	Terminabuan - Moswaren	38
		314	Terminabuan - Wayer	25
		315	Terminabuan - Sasnek	45
		316	Terminabuan - Aitinyo	81
		317	Terminabuan - Ayamaru	63,6
		318	Kajase - Konda	30
		319	Kajase - Pasar Putih	52,9
		320	Kajase - Haermaran - Joksiro	48,5
		321	Kajase - Waihali	36,67
	c. MANOKWARI	322	Manokwari - Momiwaren	175
		323	Manokwari - Arfu	186
		324	Manokwari - Saray	120
		325	Manokwari - Sidey	175
		326	Momiwaren - Ransiki	30
		327	Manokwari - Masni	148

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT



ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19820414 200502 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: KP. DRJD 3339 Tahun 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN
PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran perlu dibentuk satuan pelayanan pelabuhan sungai danau dan penyeberangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

b. bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat diatur mengenai satuan pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 20 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.
- PERTAMA : Menetapkan satuan pelayanan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Satuan pelayanan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibentuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan tugas dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KETIGA : Satuan pelayanan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditempatkan pada Balai Pengelola Transportasi Darat yang memiliki satu atau lebih pelayanan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran yang dilaksanakan oleh petugas pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.
- KEEMPAT : Pembentukan satuan pelayanan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan mekanisme penetapan satuan pelayanan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang dituangkan dalam standar operasional prosedur penetapan satuan pelayanan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas dan fungsi satuan pelayanan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KERDUA harus berdasarkan rencana kebutuhan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat seluruh Indonesia;

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
dan Hubungan Masyarakat**



ENDY IRAWAN, SH., M. H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19820414/200502 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
 NOMOR : KP. DRJD 3339 Tahun 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN PELABUHAN
 SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

NO	SATPEL	NO	WILKER
(1)	(2)	(3)	(4)
A	BPTD WILAYAH I PROPINSI ACEH		
1	Pelabuhan Penyeberangan Singkil	1	Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue
		2	Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji
		3	Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh
		4	Pelabuhan Penyeberangan Sinabang
		5	Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak
		6	Pelabuhan Penyeberangan Balohan
		7	Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh
B	BPTD WILAYAH II PROPINSI SUMUT		
1	Pelabuhan Danau Tigaras	1	Pelabuhan Danau Ambarita
2	Pelabuhan Danau Muara	2	Pelabuhan Danau Simanindo
3	Pelabuhan Danau Ajibata	3	Pelabuhan Penyeberangan Sibolga
4	Pelabuhan Danau Balige	4	Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam
		5	Pelabuhan Penyeberangan Pulau Tello
		6	Pelabuhan Penyeberangan Gunung Sitoli
		7	Pelabuhan Danau Sippinggan
		8	Pelabuhan Danau Marbun Toruan
		9	Pelabuhan Danau Silalahi
		10	Pelabuhan Danau Tongging
		11	Pelabuhan Danau Porsea
		12	Pelabuhan Danau Onan Rungu
C	BPTD WILAYAH III PROPINSI SUMBAR		
1	Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus	1	Pelabuhan Penyeberangan Siberut
		2	Pelabuhan Penyeberangan Tua Pejat
		3	Pelabuhan Penyeberangan Sikakap
D	BPTD WILAYAH IV PROPINSI RIAU DAN KEPRI		
1	Pelabuhan Penyeberangan Dumai	1	Pelabuhan Penyeberangan Sei Selari
2	Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan	2	Pelabuhan Penyeberangan Alai Insit
3	Pelabuhan Penyeberangan Matak	3	Pelabuhan Penyeberangan Pecah Buyung
4	Pelabuhan Penyeberangan Tj. Uban	4	Pelabuhan Penyeberangan Rupert
5	Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur	5	Pelabuhan Penyeberangan Air Putih
		6	Pelabuhan Penyeberangan Sagu Sagu Lukit
		7	Pelabuhan Penyeberangan Kampung Balak
		8	Pelabuhan Penyeberangan Selat Belia
		9	Pelabuhan Penyeberangan Tj. Balai Karimun
		10	Pelabuhan Penyeberangan Dabo
		11	Pelabuhan Penyeberangan Penarik
		12	Pelabuhan Penyeberangan Dompok
		13	Pelabuhan Penyeberangan Tambelan
		14	Pelabuhan Penyeberangan Sedanau
		15	Pelabuhan Penyeberangan Penagi
E	BPTD WILAYAH V PROPINSI JAMBI		
		1	Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal
		2	Pelabuhan Penyeberangan Kuala Jambi
		3	Pelabuhan Penyeberangan Sorolangun
		4	Pelabuhan Penyeberangan Muara Bulian
		5	Pelabuhan Penyeberangan Jambi
		6	Pelabuhan Penyeberangan Angso Duo
		7	Pelabuhan Penyeberangan Muara Sabak
		8	Pelabuhan Penyeberangan Nipah Panjang
F	BPTD WILAYAH VI PROPINSI BENGKULU DAN LAMPUNG		
1	Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni	1	Pelabuhan Penyeberangan Pulau Baai
		2	Pelabuhan Penyeberangan Kahyapu
		3	Dermaga Lombok
		4	Dermaga Wiralaga
		5	Dermaga Sungai KTM
		6	Dermaga Kuala Teladas
G	BPTD WILAYAH VII PROPINSI SUMSEL DAN BABEL		
1	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian	1	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api
2	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato	2	Pelabuhan Sungai 35 Ilir
		3	Pelabuhan Sungai Sri Menanti

		4	Pelabuhan Sungai 7 Ulu
		5	Pelabuhan Sungai 16 Ilir
		6	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Rui
		7	Pelabuhan Penyeberangan Sadai
H	BPTD WILAYAH VIII PROPINSI BANTEN		
1	Pelabuhan Penyeberangan Merak		
I	BPTD WILAYAH IX PROPINSI JAWA BARAT		
		1	Dermaga Danau Cirata (Babakan Garut)
		2	Dermaga Danau Cirata (Cipicung)
		3	Dermaga Danau (Cisetul)
		4	Dermaga Danau Cirata (Kebon Coklat)
		5	Dermaga Danau Cirata (Jangari)
		6	Dermaga Muara Bendera
		7	Dermaga Muaragembong
		8	Dermaga Eretan
		9	Dermaga Danau Saguling (Maroko)
		10	Dermaga Sungai Pamotan
		11	Pelabuhan Majingklak
		12	Pelabuhan Kalipucang
		13	Pelabuhan Jatiluhur
		14	Dermaga Serpis (Waduk Jatiluhur)
		15	Dermaga di Daya Baru (Waduk Jatiluhur)
J	BPTD WILAYAH X PROPINSI JATENG & D.I.Y		
		1	Pelabuhan Penyeberangan Kendal
		2	Pelabuhan Penyeberangan Jepara
		3	Pelabuhan Penyeberangan Karimun Jawa
		4	Dermaga Kedunguter
		5	Dermaga Waduk Sermo
		6	Dermaga Sei Serang Glagah
K	BPTD WILAYAH XI PROPINSI JATIM		
1	Pelabuhan Penyeberangan Ketapang	1	Pelabuhan Penyeberangan Paciran
2	Pelabuhan Penyeberangan Ujung	2	Pelabuhan Penyeberangan Jangkar
		3	Pelabuhan Penyeberangan Kamal
		4	Pelabuhan Penyeberangan Kalianget
		5	Pelabuhan Penyeberangan Bawean
		6	Pelabuhan Penyeberangan Sapeken
		7	Pelabuhan Penyeberangan Sapudi
		8	Pelabuhan Penyeberangan Pulau Raas
		9	Pelabuhan Penyeberangan Kangean
L	BPTD WILAYAH XII PROPINSI BALI DAN NTB		
1	Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk	1	Dermaga Danau Beratan
2	Pelabuhan Penyeberangan Padangbai	2	Dermaga Kedisan
3	Pelabuhan Penyeberangan Sampalan	3	Dermaga Kuburan
4	Pelabuhan Penyeberangan Kayangan	4	Dermaga Trunyan
5	Pelabuhan Penyeberangan Pototano	5	Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida
6	Pelabuhan Penyeberangan Sape	6	Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul
7	Pelabuhan Penyeberangan Lembar		
M	BPTD WILAYAH XIII PROPINSI NTT		
1	Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo	1	Pelabuhan Penyeberangan Bakalang
2	Pelabuhan Penyeberangan Lantuka	2	Pelabuhan Penyeberangan Naikliu
3	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	3	Pelabuhan Penyeberangan Waikelo
4	Pelabuhan Penyeberangan Bolok	4	Pelabuhan Penyeberangan Waingapu
		5	Pelabuhan Penyeberangan Raijua
		6	Pelabuhan Penyeberangan Seba
		7	Pelabuhan Penyeberangan Ndao
		8	Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru
		9	Pelabuhan Penyeberangan Hansisi
		10	Pelabuhan Penyeberangan Tlk. Gurita
		11	Pelabuhan Penyeberangan Baranusa
		12	Pelabuhan Penyeberangan Aimere
		13	Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo
		14	Pelabuhan Penyeberangan Kawapante
		15	Pelabuhan Penyeberangan Lewoleba
		16	Pelabuhan Penyeberangan Adonara
		17	Pelabuhan Penyeberangan Waiwerang
		18	Pelabuhan Penyeberangan Pamana
		19	Pelabuhan Penyeberangan Marapokot
N	BPTD WILAYAH XIV PROPINSI KALBAR		
1	Pelabuhan Penyeberangan Sintete	1	Pelabuhan Penyeberangan Bardan
2	Pelabuhan Penyeberangan Bardan Siantan	2	Pelabuhan Penyeberangan Siantan
		3	Pelabuhan Penyeberangan Tj. Harapan
		4	Pelabuhan Penyeberangan Tlk. Kalong
		5	Pelabuhan Penyeberangan Parit Sarem
		6	Pelabuhan Penyeberangan Sungai Nipah
		7	Pelabuhan Sungai Rasau Jaya
		8	Pelabuhan Penyeberangan Pinang Luar
		9	Pelabuhan Sungai Tlk. Batang

O	BPTD WILAYAH XV PROPINSI KALSEL		
1	Pelabuhan Penyeberangan Batulicin	1	Dermaga Sei Gampa
		2	Dermaga Pendalaman Baru
		3	Dermaga Pasar Lima
		4	Pelabuhan Penyeberangan Tj. Serdang
		5	Pelabuhan Penyeberangan P. Laut Timur
		6	Pelabuhan Penyeberangan Stagen
		7	Pelabuhan Penyeberangan Sebuksu
		8	Pelabuhan Penyeberangan Sigam
		9	Pelabuhan Penyeberangan Tj. Batu
		10	Pelabuhan Penyeberangan Tarjun
P	BPTD WILAYAH XVI PROPINSI KALTENG		
1	Dermaga Sungai Mintin	1	Dermaga Sungai Mentangai
		2	Dermaga Sungai Maliku
		3	Dermaga Sungai Badirih
		4	Dermaga Sungai Palambehan
		5	Dermaga Sungai Selat
		6	Dermaga Sungai Murung Keramat
		7	Dermaga Terusan Karya Bataguh
		8	Dermaga Sungai Lupak Dalam
		9	Dermaga Sei Ijum
		10	Dermaga Sungai Bapinang
		11	Dermaga Sungai Basirih
		12	Pelabuhan Penyeberangan Kumai
		13	Pelabuhan Penyeberangan Bahaur
Q	BPTD WILAYAH XVII PROPINSI KALTIM DAN KALTARA		
1	Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	1	Pelabuhan Penyeberangan Penajam
		2	Dermaga Sungai Tj. Keramat
		3	Pelabuhan Penyeberangan Tarakan
		4	Pelabuhan Penyeberangan Simanggaris
		5	Pelabuhan Penyeberangan Sebatik
		6	Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun
		7	Pelabuhan Penyeberangan Ancam
R	BPTD WILAYAH XVIII PROPINSI SULTRA		
1	Pelabuhan Penyeberangan Kolaka	1	Pelabuhan Penyeberangan Lasusua
2	Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa	2	Pelabuhan Penyeberangan Torobulu
		3	Pelabuhan Penyeberangan Bamea
		4	Pelabuhan Penyeberangan Tondasi
		5	Pelabuhan Penyeberangan Sikeli
		6	Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka
		7	Pelabuhan Penyeberangan Kadatua
		8	Pelabuhan Penyeberangan Siompu
		9	Pelabuhan Penyeberangan Wara
		10	Pelabuhan Penyeberangan Baubau
		11	Pelabuhan Penyeberangan Tolandona
		12	Pelabuhan Penyeberangan Kendari
		13	Pelabuhan Penyeberangan Lenggara
		14	Pelabuhan Penyeberangan Wawoni
		15	Pelabuhan Penyeberangan Labuan
		16	Pelabuhan Penyeberangan Amalengo
		17	Pelabuhan Penyeberangan Tampo
		18	Pelabuhan Penyeberangan Raha
		19	Pelabuhan Penyeberangan Pure
		20	Pelabuhan Penyeberangan Wanci
		21	Pelabuhan Penyeberangan Binongko
		22	Pelabuhan Penyeberangan Tomia
		23	Pelabuhan Penyeberangan Kamaru
		24	Pelabuhan Penyeberangan Dongkala
S	BPTD WILAYAH XIX PROPINSI SULSEL DAN SULBAR		
1	Pelabuhan Penyeberangan Bajoe	1	Pelabuhan Penyeberangan Bira
2	Pelabuhan Penyeberangan Mamuju	2	Pelabuhan Penyeberangan Siwa
		3	Pelabuhan Penyeberangan Timampu
		4	Pelabuhan Penyeberangan Garongkong
		5	Pelabuhan Penyeberangan Pamatata
		6	Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukan
		7	Dermaga Sungai Tarailu
		8	Pelabuhan Sungai Sampaga
T	BPTD WILAYAH XX PROPINSI SULTENG		
1	Pelabuhan Penyeberangan Tajpa	1	Pelabuhan Penyeberangan Tolitoli
2	Pelabuhan Penyeberangan Pagimana	2	Pelabuhan Penyeberangan Toboli
		3	Dermaga Danau Lindu
		4	Dermaga Danau Poso
		5	Pelabuhan Penyeberangan Kolonedale
		6	Pelabuhan Penyeberangan Baturube
		7	Pelabuhan Penyeberangan Salakan
		8	Pelabuhan Penyeberangan Boniton
		9	Pelabuhan Penyeberangan Banggai
		10	Pelabuhan Penyeberangan Luwuk
		11	Pelabuhan Penyeberangan Ampana

		12	Pelabuhan Penyeberangan Wakai
U	BPTD WILAYAH XXI PROPINSI GORONTALO		
1	Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo		
2	Pelabuhan Penyeberangan Marisa		
V	BPTD WILAYAH XXII PROPINSI SULUT		
1	Pelabuhan Penyeberangan Bitung	1	Pelabuhan Penyeberangan Amurang
		2	Pelabuhan Penyeberangan Likupang
		3	Pelabuhan Penyeberangan Biaro
		4	Pelabuhan Penyeberangan Ulu Siau
		5	Pelabuhan Penyeberangan Kawaluso
		6	Pelabuhan Penyeberangan Marore
		7	Pelabuhan Penyeberangan Musi
		8	Pelabuhan Penyeberangan Miangas
		9	Pelabuhan Penyeberangan Marampit
		10	Pelabuhan Penyeberangan Kabaruan
		11	Pelabuhan Penyeberangan Melonguane
		12	Pelabuhan Penyeberangan Pananaru
		13	Pelabuhan Penyeberangan Tagulandang
		14	Pelabuhan Penyeberangan Lembeh
W	BPTD WILAYAH XXIII PROPINSI MALUKU		
1	Pelabuhan Penyeberangan Galala	1	Pelabuhan Penyeberangan Waipirit
2	Pelabuhan Penyeberangan Hunimua	2	Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bara
		3	Pelabuhan Penyeberangan Namlea
		4	Pelabuhan Penyeberangan Ambalau
		5	Pelabuhan Penyeberangan Waisala
		6	Pelabuhan Penyeberangan Haruku
		7	Pelabuhan Penyeberangan Waeriang
		8	Pelabuhan Penyeberangan Kisar
		9	Pelabuhan Penyeberangan Ilwaki
		10	Pelabuhan Penyeberangan Leti
		11	Pelabuhan Penyeberangan Moa
		12	Pelabuhan Penyeberangan Lakor
		13	Pelabuhan Penyeberangan Letwurung
		14	Pelabuhan Penyeberangan Tapa
		15	Pelabuhan Penyeberangan Saumlaki
		16	Pelabuhan Penyeberangan Wunlah
		17	Pelabuhan Penyeberangan Larat
		18	Pelabuhan Penyeberangan Dobo
		19	Pelabuhan Penyeberangan Benjina
		20	Pelabuhan Penyeberangan Lamerang
		21	Pelabuhan Penyeberangan Wailey
		22	Pelabuhan Penyeberangan Saparua
		23	Pelabuhan Penyeberangan Nusa Laut
		24	Pelabuhan Tayando
		25	Pelabuhan Penyeberangan Wahai
		26	Pelabuhan Penyeberangan Tual
		27	Pelabuhan Penyeberangan Kesui
		28	Pelabuhan Penyeberangan Teor
		29	Pelabuhan Penyeberangan Gorom
		30	Pelabuhan Penyeberangan Geser
		31	Pelabuhan Penyeberangan Airmanang
		32	Pelabuhan Penyeberangan Amahai
X	BPTD WILAYAH XXIV PROPINSI MALUKU UTARA		
1	Pelabuhan Penyeberangan Bastiong	1	Pelabuhan Penyeberangan Sidangole
2	Pelabuhan Penyeberangan Daruba Morotai	2	Pelabuhan Penyeberangan Rao
		3	Pelabuhan Penyeberangan Rum
		4	Pelabuhan Penyeberangan Dawora
		5	Pelabuhan Penyeberangan Sofifi
		6	Pelabuhan Penyeberangan Makian
		7	Pelabuhan Penyeberangan Kayoa
		8	Pelabuhan Penyeberangan Mangole
		9	Pelabuhan Penyeberangan Bobong
		10	Pelabuhan Penyeberangan Sanana
		11	Pelabuhan Penyeberangan Tobelo
		12	Pelabuhan Penyeberangan Subaim
		13	Pelabuhan Penyeberangan Patani
		14	Pelabuhan Penyeberangan Gebe
		15	Pelabuhan Penyeberangan Weda
		16	Pelabuhan Penyeberangan Saketa
		17	Pelabuhan Penyeberangan Babang
		18	Pelabuhan Penyeberangan Obi
Y	BPTD WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT		
1	Dermaga Sungai Agats	1	Dermaga Sungai Akats
		2	Dermaga Sawaerma
		3	Dermaga Sungai Ewer
		4	Dermaga Sungai Pepera
		5	Pelabuhan Penyeberangan Pomako
		6	Pelabuhan Penyeberangan Samabusa
		7	Pelabuhan Penyeberangan Mokmer

	8	Pelabuhan Penyeberangan Kelapalima
	9	Pelabuhan Penyeberangan Bade
	10	Dermaga Danau Sentani
	11	Pelabuhan Penyeberangan Kabuena
	12	Pelabuhan Penyeberangan Klademak
	13	Pelabuhan Penyeberangan Waigeo
	14	Pelabuhan Penyeberangan Batanta
	15	Pelabuhan Penyeberangan Salawati
	16	Pelabuhan Penyeberangan Folley
	17	Pelabuhan Penyeberangan Arar
	18	Pelabuhan Penyeberangan Fakfak
	19	Pelabuhan Penyeberangan Kaimana
	20	Pelabuhan Penyeberangan Wasior
	21	Pelabuhan Penyeberangan Manokwari
JUMLAH SATPEL : 47		JUMLAH WILKER : 281

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: KP. DRJD 3339 Tahun 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN
PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN
PENYEBERANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**Mekanisme Penetapan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, Dan
Penyeberangan**

Persyaratan Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan ditetapkan berdasarkan:

a. Unsur Pokok

Unsur pokok merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan
pelayaran dan tugas operasional lainnya pada Satuan Pelayanan Pelabuhan
Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Unsur pokok terdiri atas:

1. status aset Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di lokasi
tersebut milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. status pelabuhan diusahakan oleh Badan Usaha Milik Negara/ Badan
Usaha Milik Daerah;
3. jumlah lintas penyeberangan komersil dan trayek angkutan sungai dan
danau;
4. frekuensi kunjungan kapal;
5. waktu operasional Pelabuhan;
6. jumlah fasilitas Pelabuhan; dan
7. fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran.

b. Unsur Penunjang.

Unsur penunjang merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran dan tugas operasional lainnya pada Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Unsur penunjang, terdiri atas:

1. penerimaan negara bukan pajak;
2. jangkauan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan keselamatan pelayaran transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dan tugas operasional lainnya; dan
3. jumlah sumber daya manusia dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada tugas dan fungsi pengawasan keselamatan pelayaran transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dan tugas operasional lainnya.

Mekanisme penetapan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagai berikut:

- a. Diusulkan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat setelah memenuhi penilaian unsur pokok dan unsur penunjang.
- b. Unsur pokok dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah menerima usulan dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.
- c. Setelah menerima usulan dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membentuk Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
- d. Tim penilaian, terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Teknis.
- e. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan penetapan.

- f. Direktur Jenderal Perhubungan Darat menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan setelah memenuhi ketentuan kebutuhan organisasi dan beban kerja.

	SOP DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT	Nomor SOP	:	
		Tgl. ditetapkan	:	
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. diberlakukan	:	
		disahkan oleh	:	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
		Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si		
Penetapan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan				
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:		
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan		1. Melakukan penilaian penetapan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan; 2. Melakukan penyusunan kebutuhan anggaran operasional Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP; 3. Melakukan penyusunan kebutuhan jumlah SDM dan kebutuhan kompetensi SDM berdasarkan beban kerja.		
Keterkaitan:		Peralatan/ Perlengkapan:		
1. SOP Penyusunan DIPA 2. SOP Penyiapan Bahan RKA 3. SOP Penyusunan formasi CPNS 4. SOP Penyusunan Standar Kompetensi SDM		1. Laptop / PC 2. Printer / Scanner 3. Infocus		
Peringatan:				
1. Apabila SOP ini tidak di laksanakan, pemetaan pelaksanaan tugas fungsi pengawasan keselamatan dan pelayanan serta penghitungan kebutuhan anggaran operasional pelabuhan SDP berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak dapat terlaksana dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak di laksanakan, pemetaan kebutuhan jumlah SDM dan kebutuhan kompetensi SDM berdasarkan beban kerja tidak dapat terlaksana.				

No	Kegiatan	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Jendral Perhubungan Darat	Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat	Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan	Kabag Kepegawaian dan Umum	Kabag Hukum dan Humas	Tim Penilai Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa Surat Permohonan penetapan Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP, serta menguskan Seaditjen Perhubungan Darat dan Direktur Transportasi SDP untuk membentuk Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan sekaligus melakukan penilaian melalui Tim dimaksud.							Surat Usulan Kepala BPTD	15 menit	Disposisi pembahasan usulan	Kelengkapan Surat Usulan: 1. Surat Permohonan 2. Justifikasi pemenuhan Kriteria Satpel (unsur pokok): a). Status Aset milik Ditjen Hubdat/BUMN; b). Status Pelabuhan diusahakan; c). Status Lintasan meliputi Komersil dan Perintis; d). Kunjungan Kapal >10 trip perhari; e). Waktu Operasional Pelabuhan 24 Jam; f). Jumlah Fasilitas Pelabuhan lebih dari 1 Dermaga; g). Terdapat alat Komunikasi (LPS). 3. Pemenuhan Unsur Penunjang a). Penerimaan negara bukan pajak; b). Jangkauan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan keselamatan pelayaran transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dan tugas operasional lainnya; dan c). Jumlah sumber daya manusia dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada tugas dan fungsi pengawasan keselamatan pelayaran transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dan tugas operasional lainnya.
2	1. Menerima dan melakukan koordinasi dengan Direktur Transportasi SDP untuk membentuk Tim Penilaian dan melaksanakan penilaian melalui Tim dimaksud; 2. Menguskan Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum untuk membuat Nota Dinas dan Konsep SK Tim Penilai serta rencana kerja Tim.							1. Surat Usulan (berserta kelengkapan) 2. Disposisi Pembahasan	1 Jam	1. Disposisi Pembentukan Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan; 2. Disposisi pembuatan Nota Dinas kepada Direktur Unit Kerja Teknis terkait	Nota Dinas permintaan nama Tim teknis kepada Direktur TSDP dan konsep Tim Penilai serta rencana pembahasan di buat oleh Bagian Kepegawaian dan Umum
3	Menerima dan menguskan nama Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan dari Direktorat Transportasi SDP selaku penilai teknis							1. Surat Usulan (berserta kelengkapan) 2. Nota Dinas permohonan nama Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan	1 Jam	Disposisi pembuatan Nota Dinas penyampaian nama anggota Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (Tim Teknis).	Nota Dinas penyampaian nama anggota Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (Tim Teknis), di buat oleh Kasubbag Tata Usaha Dit.TSDP, setelah di tetapkan oleh Direktur TSDP di sampaikan ke Bagian Kepegawaian dan Umum.
4	1. Menerima dan membuat konsep Nota Dinas permintaan nama anggota Tim Penilai; 2. Membuat konsep SK Tim dan rencana kerja Tim; 3. Menyampaikan konsep SK Tim dan rencana kerja Tim ke Bagian Hukum untuk di proses penetapannya							1. Surat Usulan (berserta kelengkapan) 2. Nota Dinas penyampaian nama anggota Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (Tim Teknis).	1 Hari Kerja	Konsep SK Tim dan konsep Rencana kerja Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan	1. Konsep SK Tim dan Konsep Rencana kerja Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan, di sempurnakan di Bagian Hukum Setditjen Hubdat untuk kemudian disampaikan kepada Seaditjen Hubdat untuk mendapatkan persetujuan; 2. Tim Teknis terdiri dari: a. Setditjen Perhubungan Darat (terdiri dari 4 bagian di Setditjen); b. Direktorat TSDP.
5	1. Menerima dan memeriksa konsep SK Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP berdasarkan ketentuan perundangan; 2. Menyampaikan konsep SK Tim dan rencana kerja kepada Seaditjen Hubdat untuk mendapat persetujuan.							Konsep SK Tim dan konsep Rencana kerja Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan.	1 Jam	Konsep SK Tim dan konsep Rencana kerja Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan.	

No	Kegiatan	PELAKSANA						Mutu Baru			Keterangan
		Direktur Jendral Perhubungan Darat	Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat	Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan	Kabag Kepegawaian dan Umum	Kabag Hukum dan Humas	Tim Penilai Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	1. Menerima dan memeriksa konsep SK Tim Penilai dan rencana kerjanya. 2. Menyetujui konsep SK Tim dan rencana kerja Tim.							Konsep SK Tim dan konsep Rencana kerja Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan.	30 menit	Konsep SK Tim dan konsep Rencana kerja Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan.	
7	Menerima dan menyetujui konsep SK Tim dan konsep Rencana kerja Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan.							Konsep SK Tim dan konsep Rencana kerja Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan.	15 Menit	SK Tim dan Rencana kerja Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan.	1. SK Tim dan Rencana kerja Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan yang telah ditetapkan Direktur Jenderal menjadi dasar pelaksanaan tugas Tim Penilai; 2. Pertinggal SK Tim dan Rencana Kerja Tim menjadi dokumentasi kegiatan pada bagian Arsip.
8	Melaksanakan Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan berdasarkan rencana kerja Tim.							SK Tim dan Rencana kerja Tim Penilaian Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan.	5 Hari Kerja	1. Laporan kerja Tim Penilai; 2. Hasil penilaian berupa rekomendasi; 3. Konsep SK Pembentukan Satpel Pelabuhan SDP (bila hasil penilaian memenuhi ketentuan);	1. Tim Teknis terdiri dari : a. Setdijen Perhubungan Darat; b. Direktorat TSDP. 2. 5 Hari kerja terbagi atas : a. 3 Hari kerja pembahasan; b. 2 Hari kerja penyusunan Hasil penilaian sebagai rekomendasi penetapan oleh Dirjen Perhubungan Darat; 3. Dalam penyusunan hasil penilaian Tim penilai juga memperhatikan kebutuhan organisasi dan beban kerja; 4. Bila Hasil penilaian sudah memenuhi semua ketentuan konsep SK. Penetapan Satpel Pelabuhan SDP dapat di susun dan langsung mendapat persetujuan dan bagian hukum untuk dimajukan kepada Dirjen Hubdat.
9	1. Menerima dan memeriksa : a). Laporan kerja Tim Penilai; b). Hasil penilaian berupa rekomendasi; c). Konsep SK Pembentukan Satpel Pelabuhan SDP (bila hasil penilaian memenuhi ketentuan). 2. Menyetujui Konsep SK Pembentukan Satpel Pelabuhan SDP (bila hasil penilaian memenuhi ketentuan).							1. Laporan kerja Tim Penilai; 2. Hasil penilaian berupa rekomendasi; 3. Konsep SK Pembentukan Satpel Pelabuhan SDP (bila hasil penilaian memenuhi ketentuan).	30 Menit	1. Laporan kerja Tim Penilai; 2. Hasil penilaian berupa rekomendasi; 3. Konsep SK Pembentukan Satpel Pelabuhan SDP (bila hasil penilaian memenuhi ketentuan).	
10	Menerima dan menyetujui SK Pembentukan Satpel Pelabuhan SDP							1. Laporan kerja Tim Penilai; 2. Hasil penilaian berupa rekomendasi; 3. Konsep SK Pembentukan Satpel Pelabuhan SDP (bila hasil penilaian memenuhi ketentuan).	30 Menit	SK Pembentukan Satpel Pelabuhan SDP	SK Pembentukan Satpel Pelabuhan SDP menjadi dasar pelaksanaan tugas fungsi Satpel serta pengajuan kebutuhan SDM dan Program/Kegiatan serta Anggaran bagi BPTD terkait.



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

td.

Dra. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: KP. DRJD 3339 Tahun 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN SATUAN PELAYANAN
PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

**Format Struktur Biaya Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH RAYA
1	Operasional Pelabuhan (Nama Pelabuhan)	1	LOK		x.xxx.xxx
521.111	Belanja Keperluan Perkantoran				
	- Honor Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi Bidang Transportasi Darat orang	x	OB	x.xxx	xx.xxx
521.113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				
	- Penambah daya tahan tubuh orang	x	OH	x.xxx	xx.xxx
522.141	Belanja Sewa				
	- Sewa Bangunan Untuk Rumah Dinas Mess Pegawai	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
524.111	Belanja perjalanan biasa				
	- Belanja Perjalanan Kegiatan Operasional	1	Thn	x.xxx	xx.xxx

Catatan :

- Harga satuan mengacu pada Standar Biaya Masukan yang berlaku;
- Jasa keahlian teknis dan administrasi beserta daya tahan tubuh menyesuaikan jumlah personil di lapangan (berdasarkan analisis beban kerja);
- Belanja operasional lainnya disesuaikan dengan kebutuhan *real* di lapangan.

**Format Struktur Biaya Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan yang Diusahakan**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH RAYA
1	Operasional Pelabuhan (Nama Pelabuhan)	1	LOK		x.xxx.xxx
521.111	Belanja Keperluan Perkantoran				
	- Jasa Petugas Pramubakti (.... orang)	xx	OB	x.xxx	xx.xxx
	- Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi Bidang Transportasi Darat orang	xx	OB	x.xxx	xx.xxx
521.113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				
	Penambah Daya Tahan Tubuh (..... orang)	xx	OH	x.xxx	xx.xxx
521.119	Belanja Barang Operasional Lainnya				
	Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
521.811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				
	Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
522.141	Belanja Sewa				
	Sewa Bangunan untuk Mess Pegawai	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
522.119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				
	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
523.111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
	Pemeliharaan Gedung Satuan Pelayanan	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
523.121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
524.111	Belanja perjalanan biasa				
	Belanja Perjalanan Kegiatan Operasional	1	Thn	x.xxx	xx.xxx

Catatan :

- Harga satuan mengacu pada Standar Biaya Masukan yang berlaku;
- Jasa keahlian teknis dan administrasi beserta daya tahan tubuh menyesuaikan jumlah personil di lapangan (berdasarkan analisis beban kerja);
- Belanja operasional lainnya disesuaikan dengan kebutuhan *real* di lapangan.

**Format Struktur Biaya Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH RAYA
1	Operasional Pelabuhan (Nama Pelabuhan)	1	LOK		x.xxx.xxx
521.111	Belanja Keperluan Perkantoran				
	- Jasa Keamanan (.... orang)	xx	OB	x.xxx	xx.xxx
	- Jasa Petugas Kebersihan (.... orang)	xx	OB	x.xxx	xx.xxx
	- Jasa Petugas Pramubakti (.... orang)	xx	OB	x.xxx	xx.xxx
	- Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi Bidang Transportasi Darat orang	xx	OB	x.xxx	xx.xxx
521.113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				
	- Penambah daya tahan tubuh orang	xx	OH	x.xxx	xx.xxx
521.119	Belanja Barang Operasional Lainnya				
	Belanja Bahan Peralatan Kerja dan Peralatan Kebersihan	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
521.811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				
	Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran (ATK, Barang Cetak, Alat Rumah Tangga, Langganan Surat Kabar dan Air Minum Pegawai)	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
522.141	Belanja Sewa				
	- Sewa Kendaraan Operasional	1	UT	x.xxx	xx.xxx
	- Sewa Bangunan Untuk Rumah Dinas Mess Pegawai	1	UT	x.xxx	xx.xxx
522.119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				
	- Telepon dan Internet	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
	- Listrik	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
	- Air	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
	- Sampah	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
523.111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
	- Pemeliharaan Dermaga MB *)	xx	UT	x.xxx	xx.xxx
	- Pemeliharaan Plengsengan *)	xx	UT	x.xxx	xx.xxx
	- Pemeliharaan Rumah Speedboat *)	xx	UT	x.xxx	xx.xxx
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
523.121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
	- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
523.122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas				
	- Belanja Bahan Bakar	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
524.111	Belanja perjalanan biasa				
	- Belanja Perjalanan Kegiatan Operasional	1	Thn	x.xxx	xx.xxx
532.111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	- Pengadaan Peralatan Penunjang Perkantoran	xx	Pkt	x.xxx	xx.xxx
	- Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Informasi	xx	Pkt	x.xxx	xx.xxx

*) Jumlah unit menyesuaikan fasilitas yang terdapat di pelabuhan

Catatan :

- Harga satuan mengacu pada Standar Biaya Masukan yang berlaku;
- Jasa keahlian teknis dan administrasi beserta daya tahan tubuh menyesuaikan jumlah personil di lapangan (berdasarkan analisis beban kerja);
- Belanja operasional lainnya disesuaikan dengan kebutuhan *real* di lapangan.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH IX - PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Surya Sumantri No. 92, Sukagalih,
Sukajadi, Bandung 40164

Telp. (022) 20281203

Fax. (022) 20281203

Email : bptdjabar@gmail.com

**JUSTIFIKASI
PENGOPERASIAN WILAYAH PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN PROVINSI JAWA BARAT**

- Sektor** : Kementerian Perhubungan
- Sub Sektor** : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Satuan Kerja** : Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat
- Program** : Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan dikelola Operasional
Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- Latar Belakang** : Salah satu fungsi sektor transportasi adalah sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah lain, termasuk di daerah perairan. Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur. Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Bertitik tolak dari fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah membangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang telah dihibahkan/diserah terimakan operasioanl kepada Pemerintah Daerah masih belum mendapat perhatian terutama terkait dengan kinerja operasionalnya. Kinerja operasional yang dimaksud bukan hanya meliputi pencapaian pelayanan trip terhadap rencana umum, namun juga meliputi pola perawatan dan kondisi teknis sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- Pelabuhan merupakan suatu titik simpul transportasi yang merupakan salah satu pusat aktifitas masyarakat, terutama kaitannya dengan proses pengangkutan. Kondisi ramai atau tidaknya suatu aktifitas di Pelabuhan dapat mencerminkan potensi dan kinerja pelabuhan tersebut. Selain itu,

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua



kapal yang menjadi sarana angkut dalam kegiatan Operasional Moda Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang keberadaannya amat diperlukan secara mutlak dan mempengaruhi kinerja pelayanan angkutan secara keseluruhan.. untuk itu monitoring dan evaluasi terhadap system pelayanan minimum serta sarana dan prasarana angkutan sangat penting dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang efektifitas dan efisiensi , maka perlu dibentuk beberapa operasional pelabuhan atau wilayah kerja pelabuhan di Provinsi Jawa Barat.

Gambaran Umum :

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang menggunakan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai alternatif perjalanan. Angkutan yang merupakan sarana transportasi untuk memindahkan barang, orang ataupun kendaraan dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun gambaran mengenai Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

Yang sudah dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat antara lain :

1. Waduk Cirata;
 - Dermaga Jangari
 - Dermaga Kebon Coklat
 - Dermaga Babakan Garut
 - Dermaga Cipicung
 - Dermaga Cisentul/ Tegal Datar
 - Dermaga Calincing
 - Dermaga Ciputri
 - Maleber
 - Leuwi Orok
 - Gondosoli

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua



2. Waduk Saguling
 - Dermaga Maroko
 - Dermaga Bunder
 - Dermaga Cililin
 - Dermaga Mariuk
 - Dermaga Ciakar
 - Bukair
 - Seketando
 - Rancaririp
 - Gamblok
 - Cibogo
3. Waduk Jatiluhur
 - Dermaga Banyu Biru
 - Dermaga Serpis
 - Dermaga Tanggul Usman
 - Dermaga Tanggul Kayat
 - Dermaga Galumpit
 - Dermaga Sukasari
4. Pelabuhan Muara Gembong
5. Pelabuhan Muara Bendera (Dit.Perhubungan Laut)
6. Eretan di Sungai Citarum;
7. Pelabuhan Majingklak
8. Pelabuhan Kalipucang
9. Dermaga Pamotan Sungai Citanduy

Yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

1. Situ Panjalu Kab. Ciamis
2. Green Canyon Cijulang Kab. Pangandaran
3. Situ Ciburuy Kab. Bandung Barat
4. Situ Patenggang; Kab. Bandung
5. Situ Cileunca Kab. Bandung
6. Situ Bagendit Kab. Garut
7. Situ Cangkuang; Kab. Garut
8. Situ Sanghyang Kab. Tasikmalaya

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua



9. Situ Gede Kota Tasikmalaya
10. Waduk Darma Kab. Kuningan
11. Talaga Remis Kab. Kuningan
12. Situ Sedong Kab. Cirebon
13. Situ Cipanten Kab. Majalengka
14. Situ Gunung Kab. Sukabumi
15. Dermaga Sungai Cikaso Kab. Sukabumi
16. Situ Sukarame Kab. Sukabumi
17. Situ Cigombong Kab. Bogor
18. Eretan Sungai Cimanuk Kab. Indramayu.
19. Pelabuhan LDF Patimban Kab. Subang

- Dasar Hukum** :
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran F (Pelayaran)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai dan Danau
 - Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - Peraturan Menteri Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
 - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.DRJD 3339 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyebrangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua



Maksud dan Tujuan : Maksud dari justifikasi ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu kondisi saat ini mengenai Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangani wilayah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan dari justifikasi ini adalah sebagai kelengkapan data dukung dan memberikan manfaat dan masukan mengenai penetapan 15 Wilayah Kerja di BPTD wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

Rencana Wilker 15 : Rencana Penetapan 15 Wilayah Kerja Operasional dalam POK DIPA Tahun 2022 , sebagai berikut :

A. WADUK CIRATA

1. Jangari
2. Kebon Coklat
3. Babakan Garut
4. Cipicung
5. Cisentul

B. WADUK SAGULING

1. Maroko

C. WADUK JATILUHUR

1. Banyu Biru
2. Serpis
3. Tanggul Usman

D. PELABUHAN KALIPUCANG

E. PELABUHAN MAJINGKLAK

F. PELABUHAN SUNGAI PAMOTAN

G. PELABUHAN MUARA GEMBONG

H. PELABUHAN MUARA BENDERA

I. ERETAN SUNGAI CITARUM

Usulan Rencana Perubahan lokasi untuk 15 Wilker : Adapun Kami mengusulkan rencana perubahan lokasi untuk 15 Wilker adalah sebagai berikut :

Bahwa Pelabuhan Muara gembong yang saat ini dioperasikan oleh Dinas

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

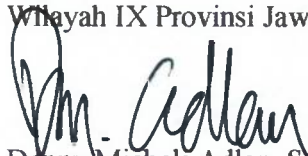


Perhubungan Provinsi Jawa Barat, serta Pelabuhan Muara Gembong dan Pelabuhan Muara Bendera merupakan Pelayaran Rakyat merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut seperti penjelasan di pendahuluan. Untuk itu Kami mengusulkan lokasi wilkernya dialihkan ke Waduk Saguling di Dermaga Bunder dan di Waduk Cirata di Dermaga Ciputri/Maleber.

Mengingat Pelabuhan Majingklak dan Pelabuhan Kalipucang merupakan melayani lintas antar provinsi yang saat ini masih dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat , sesuai dengan kewenangan di bidang pelayaran sebagaimana amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Pelaksanaan sistem penganggaran sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 90 tahun 2021. Kami mengusulkan untuk diproseskan P3D nya ke Kementerian Perhubungan sesuai dengan kewenangannya untuk kepastian dan kelangsungan pelayanan masyarakat. Sekaligus sudah sesuai tercantum di Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Bahwa Pelabuhan Majingklak merupakan Satpel TSDP di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

Demikian justifikasi ini kami buat sebagai kelengkapan data dukung yang dibutuhkan pada pengajuan perubahan lokasi wilayah kerja operasional Pelabuhan.

Bandung, 24 Januari 2022
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah IX Provinsi Jawa Barat



Denny Michels Adlan, S.T., M.M.
NIP. 19790205 200604 1 002

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

